



**REVIU RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
TAHUN 2017-2022**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2021**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 900 / 228.15 /XII/2020

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017 – 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Perangkat Kerja Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 13 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11 );
28. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017 – 2022

### **Pasal 1**

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2017 – 2022 adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng periode 2017 – 2022.

### **Pasal 2**

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2017 – 2022 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017-2022

BAB VIII PENUTUP

Pasal 3

Rincian lebih lanjut Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran keputusan ini

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

Pasal 5

Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Singaraja

Pada Tanggal : 30 Desember 2020

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Pendapatan Daerah Kabupaten  
Buleleng,



Drs. Gede Sugiarta Widiada, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670302 198901 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Yth. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Arsip.

## KATA PENGANTAR

Reviu Rencana Strategis (Reviu RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 disusun sebagai pedoman dan tolok ukur di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sasaran disusunnya Reviu RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng ialah tersusunnya dokumen perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terpadu dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten Buleleng.

Dokumen Reviu RENSTRA merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Harapan disusunnya Reviu RENSTRA ini agar dapat mengoptimalkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga visi dan misi serta prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada urusan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah akan tercapai. Target dan indikator kinerja selama lima tahun ke depan yang tercantum dalam Renstra ini merupakan upaya untuk mendukung pencapaian target dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022.

Keberhasilan pencapaian target dan sasaran Reviu RENSTRA ini membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Untuk itu seluruh pegawai harus mau bekerja keras untuk mewujudkan target kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Reviu RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok, program dan kegiatan. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Singaraja, 30 Desember 2020

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Pendapatan Daerah Kab. Buleleng



**Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 196703021989011001

**DAFTAR ISI**

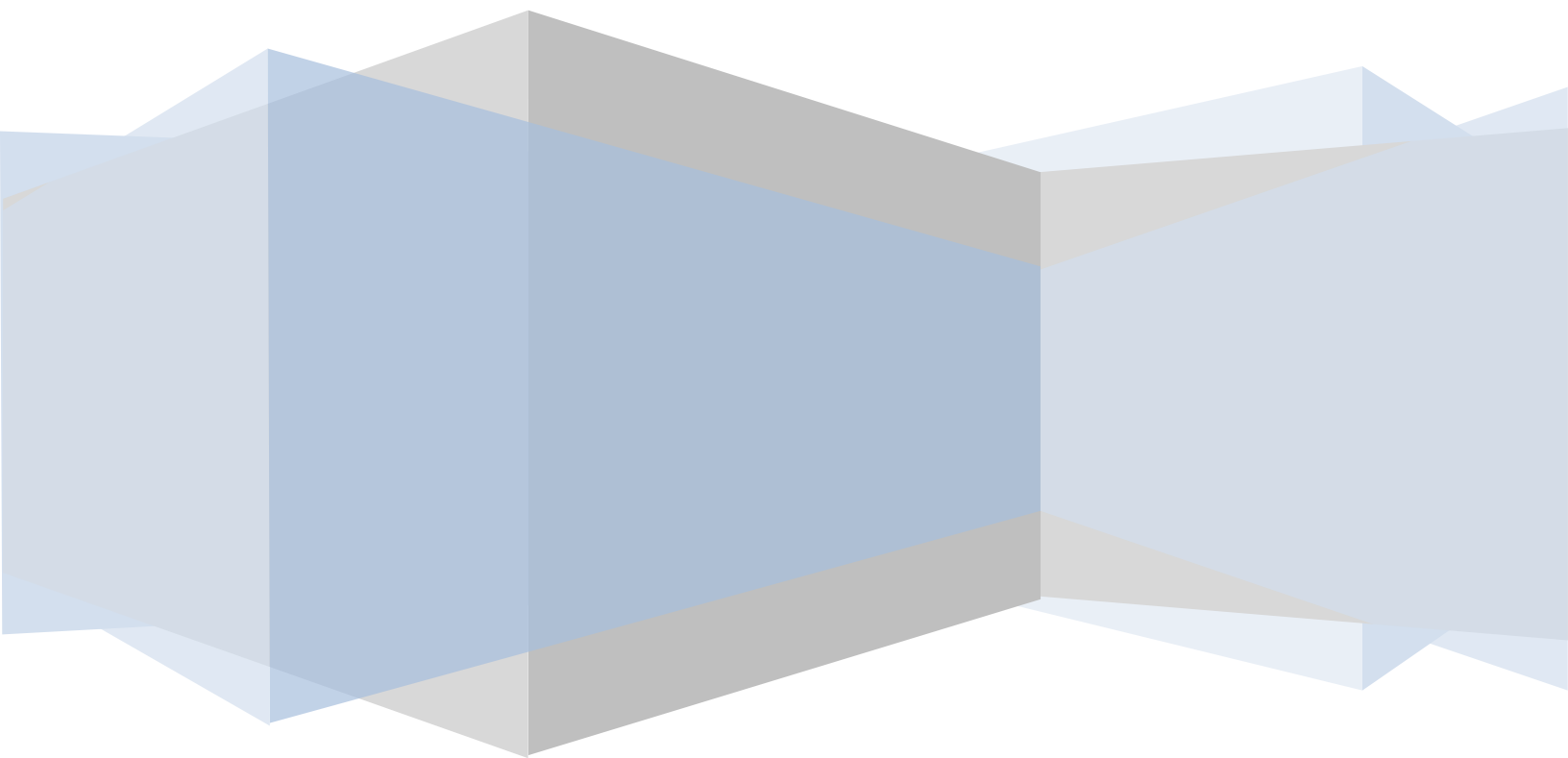
	Halaman
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>8</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	18
2.3 Kondisi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.....	22
2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>38</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Buleleng.....	38
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	38
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Bali .....	42
3.4 Telaah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	44
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.....	46
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG .....</b>	<b>53</b>
5.1 Strategi.....	53
5.2 Arah Kebijakan .....	53



<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>56</b>
6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.....	56
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017- 2022.....</b>	<b>68</b>
7.1	Indikator Kinerja.....	68
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
8.1	Kesimpulan .....	70
8.2	Kaidah Pelaksanaan .....	70

# Bab I

# PENDAHULUAN



### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan Perangkat Daerah (PD) menyusun rencana strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD dengan berpedoman pada RPJMD. Selain itu, pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang sebelumnya masih menjadi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng wajib menyusun Renstra dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022. Sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Renstra Perangkat Daerah disusun melalui persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan sehingga terarah dan tepat sasaran. Dokumen tersebut menerjemahkan perencanaan pembangunan dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Buleleng dari bidang keuangan.

Dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan pada kurun waktu 2017 - 2020 telah terjadi berbagai perubahan kebijakan khususnya Regulasi tentang Nomenklatur yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga perlu dilakukan Reviu atas Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng.

Selanjutnya Reviu Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah digunakan untuk pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Reviu Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ini disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 13 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11 );
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Reviu Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ini adalah penyesuaian atas peraturan yang berlaku sebagai dasar bagi semua stakeholder keuangan dan seluruh aparatur di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu lima tahun.

Adapun tujuan penyusunan Reviu Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah:

1. Menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng secara nyata ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum yang efektif dan efisien.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Reviu Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

#### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan telaahan Renstra Biro Keuangan Provinsi Bali; Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); serta penentuan isu-isu strategis di Perangkat Daerah.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

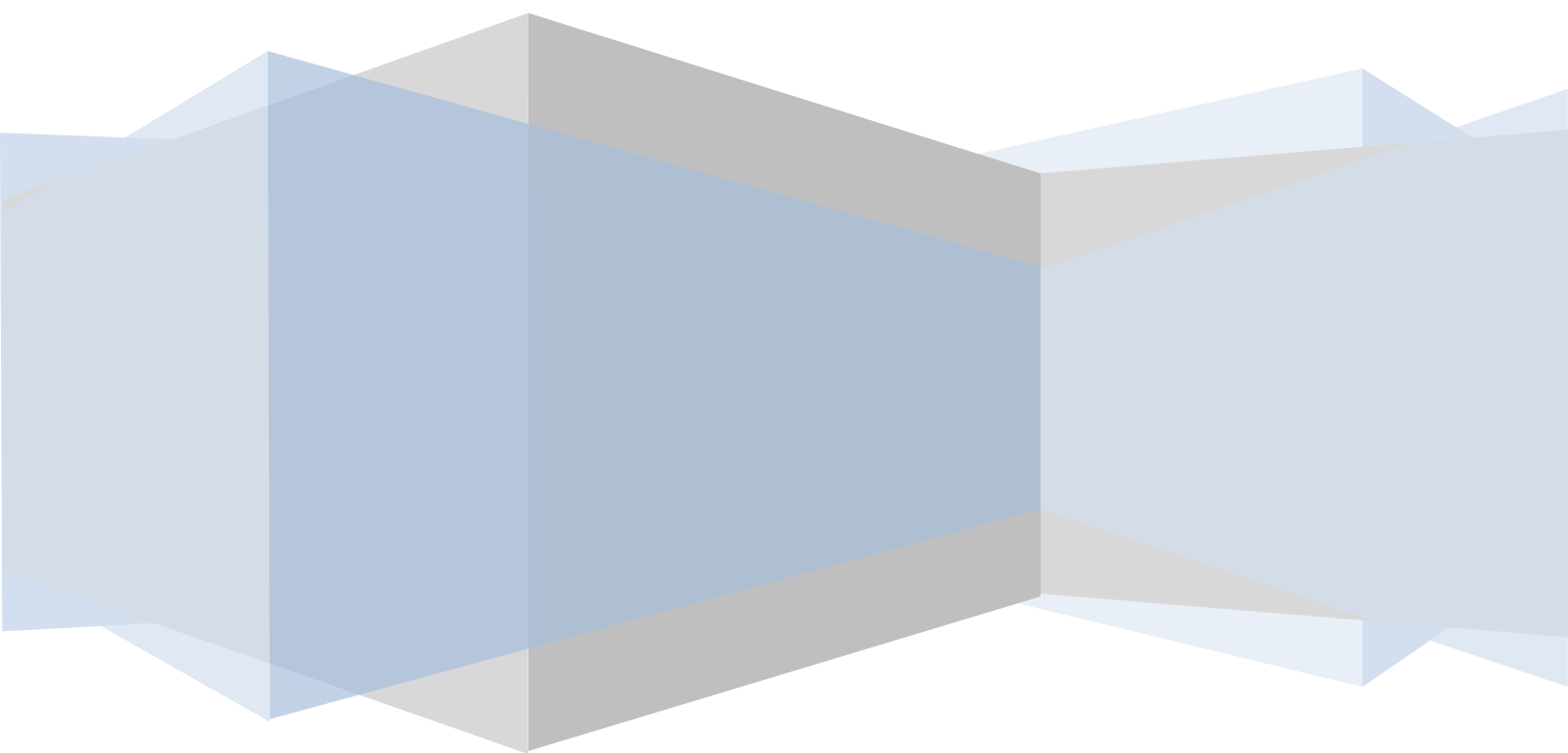
**BAB VIII PENUTUP**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra PD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh PD.

# **BAB II**

## **GAMBARAN PELAYANAN**

### **PERANGKAT DAERAH**





## 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

### 2.1.1. Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng merupakan instansi pelaksana dan bagian dari Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng bertanggung jawab kepada Bupati Buleleng melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tanggal, 30 Desember 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok:

**Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan**

### 2.1.2. Fungsi

#### 1. KEPALA BADAN.

**Kepala Badan**, mempunyai tugas fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja;
- d. merumuskan, menyusun dan melaksanakan kebijakan pelaksanaan pendapatan daerah;
- e. merumuskan, menyusun, dan melaksanakan penetapan target PAD;
- f. merumuskan dan melaksanakan evaluasi dan menyajikan informasi penerimaan PAD;
- g. merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- h. mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dalam penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan APBD Perubahan;
- i. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBD, Pergeseran APBD, dan Rancangan APBD Perubahan;
- j. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- k. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD serta melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD;
- l. merumuskan dan mengesahkan DPA-SKPD/SKPKD dan DPPA-SKPD/SKPKD;
- m. merumuskan dan mengkoordinasikan pelayanan konsultasi administrasi keuangan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- n. merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

- o. menetapkan SPD;
- p. merumuskan dan mengkaji pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman, usulan penyertaan modal atas nama pemerintah daerah, dan melakukan pengelolaan utang piutang daerah serta melaksanakan penagihan piutang;
- q. merumuskan dan menyajikan informasi keuangan daerah, melaksanakan sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah;
- r. merumuskan pelaksanaan penyimpanan/penempatan uang daerah, menyiapkan anggaran kas, mengelola/menatausahakan investasi daerah dan menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- s. merumuskan penerbitan SP2D dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- t. melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan kegiatan Bidang Pendapatan;
- u. merumuskan, mengkoordinasikan dan membina Unit Pelaksana Teknis Badan;
- v. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas dan kepastian nilai;
- w. merumuskan dan mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah, melaksanakan koordinasi dan memberikan pelayanan konsultasi administrasi kepada SKPD dalam proses perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan/pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, standarisasi, penghapusan, pemindahtanganan, pembiayaan, tuntutan ganti rugi, pendataan/inventarisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah dan barang lainnya;
- x. memberikan pertimbangan dan pelayanan administrasi kepada pimpinan dalam rangka perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan/ pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, standarisasi, penghapusan, pemindah tanganan, pembiayaan, tuntutan ganti rugi, pendataan/inventarisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
- y. merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan, kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan/ pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, standarisasi, penghapusan, pemindah tanganan, pembiayaan, tuntutan ganti rugi, pendataan/inventarisasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan membuat laporan barang milik daerah;
- z. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga serta pelaksanaan pembiayaan;
- aa. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
- bb. merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ;

- cc. merumuskan pengelolaan tata usaha, keuangan dan asset dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ;
- dd. merumuskan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- ee. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ;
- ff. mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- gg. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- hh. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ;
- ii. merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- jj. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekda; dan
- kk. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## 2. SEKRETARIAT.

**Sekretariat**, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- h. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, membuat laporan kegiatan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- i. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Badan dan UPT;

- j. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan;
- k. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- l. mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan;
- m. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Badan;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dilingkungan Badan;
- o. mengkoordinasikan pelaksanaan proses administrasi belanja bunga, subsidi, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga serta pelaksanaan pembiayaan;
- p. mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi, aplikasi dan jaringan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
- q. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### 3. BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

**Bidang Perencanaan Anggaran**, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Anggaran berdasarkan data dan program Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis penyusunan Anggaran SKPD;
- e. menyusun Regulasi di bidang Anggaran;
- f. melaksanakan sosialisasi dan menyajikan informasi kebijakan Anggaran Daerah;
- g. melaksanakan penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
- h. mereview RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD;
- i. mereview DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD;
- j. menghimpun pengesahan DPA-SKPD/ PPKD/ DPPA-SKPD/PPKD;
- k. mengkoordinasikan pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA - PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
- l. mengkoordinasikan Perencanaan Anggaran Pendapatan;
- m. mengkoordinasikan Perencanaan Anggaran Pembiayaan;
- n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### 4. BIDANG PERBENDAHARAAN

Bidang Perbendaharaan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perbendaharaan berdasarkan data dan program Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi, menyusun dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. memfasilitasi dan menghimpun Anggaran Kas SKPD dan PPKD
- f. memfasilitasi dan menetapkan SPD dan menerbitkan SP2D;
- g. memfasilitasi dan melaksanakan pengelolaan gaji, menyiapkan dokumen permintaan pembayaran bagi penerimaan daerah yang menjadi hak daerah dan penyimpanan/penempatan uang daerah;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- i. menyusun rancangan penetapan uang persediaan bagi SKPD;
- j. menyimpan uang daerah dan mengkoordinasikan pengelolaan/penatausahaan investasi daerah;
- k. menyiapkan kelengkapan dokumen permintaan pembayaran bagi penerimaan daerah yang menjadi hak daerah;
- l. melaksanakan pembukuan pencatatan penerimaan dan pengeluaran pengelolaan keuangan daerah ;
- m. mengkoordinasikan pemotongan dan penyetoran iuran wajib pegawai dan/atau pajak-pajak melalui daftar gaji perangkat daerah;
- n. melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
- o. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- p. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- q. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### 5. BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

**Bidang Akuntansi dan Pelaporan**, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan, berdasarkan data dan program Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

- d. menyusun dan melaksanakan kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. menyusun dan melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan daerah;
- f. melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- g. melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
- h. melakukan pendampingan pemeriksaan laporan keuangan daerah;
- i. menyiapkan laporan informasi keuangan daerah kepada instansi terkait;
- j. menyusun tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- k. koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
- l. koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
- m. penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## 6. BIDANG PENDATAAN DAN PELAYANAN

**Bidang Pendataan dan Pelayanan**, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pendataan dan Pelayanan, berdasarkan data dan program Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan petunjuk program kerja di bidang perencanaan dan pendataan serta administrasi pendapatan;
- e. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan dibidang pendataan wajib pajak, pendaftaran dan melakukan kegiatan, pendokumentasian data serta melaksanakan penilaian objek pajak;
- f. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pendataan wajib pajak, pendaftaran dan melakukan kegiatan, pendokumentasian data serta melaksanakan penilaian objek pajak;
- g. melaksanakan pengendalian kegiatan dibidang pendataan wajib pajak, pendaftaran dan melakukan kegiatan, pendokumentasian data serta melaksanakan penilaian terhadap objek pajak;
- h. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan standar operasional prosedur dibidang pendapatan daerah;
- i. melaksanakan penyuluhan, sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- j. menerbitkan SK NJOP dan Kartu NOP;

- k. menyelenggarakan fungsi konsultasi dan pendampingan kepada wajib pajak;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## 7. BIDANG PENAGIHAN DAN EVALUASI

**Bidang Penagihan dan Evaluasi**, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan dan Penagihan, berdasarkan data dan program Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusi tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum dibidang penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang pembukuan, pelaporan dan penagihan pajak serta retribusi;
- f. mengembangkan system informasi pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi ;
- g. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
- h. melaksanakan verifikasi terhadap pengajuan keberatan/pengurangan yang diajukan oleh wajib pajak;
- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang berikan oleh atasan.

## 8. BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

**Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah**, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan data dan program Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusi tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyusun kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. menyusun standar harga barang/jasa;
- f. menyusun kebijakan analisa kebutuhan aset/barang milik daerah;
- g. melakukan pengamanan dan penilaian barang milik daerah;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
- i. melakukan penertiban penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan barang milik daerah;
- j. melakukan penatausahaan barang milik daerah;
- k. menyimpankan dokumen kepemilikan barang milik daerah;
- l. melaksanakan dan memproses penghapusan barang milik daerah;

- m. melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penatausahaan barang milik daerah kepada semua SKPD;
- n. melaksanakan koordinasi pelaporan barang milik daerah tahunan dan 5 (lima) tahunan,
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang berikan oleh atasan.

### 2.1.3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, terdiri dari:

#### I. Kepala Badan membawahi Sekretariat dan 6 (enam) Bidang, yaitu:

- 1. Bidang Perencanaan Anggaran
- 2. Bidang Perbendaharaan
- 3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
- 4. Bidang Pendataan dan Pelayanan
- 5. Bidang Penagihan dan Evaluasi
- 6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

#### II. Sekretariat dan para Kepala Bidang membawahi :

- a. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan.
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Perencanaan Anggaran, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
  - 1. Sub Bidang Perencanaan Daerah.
  - 2. Sub Bidang Penyusunan Kebijakan Keuangan, dan
  - 3. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
- c. Bidang Perbendaharaan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
  - 1. Sub Bidang Manajemen Kas;
  - 2. Sub Bidang Transfer, dan
  - 3. Sub Bidang Belanja.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
  - 1. Sub Bidang Akuntansi.
  - 2. Sub Bidang Pelaporan, dan
  - 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan.
- e. Bidang Pendataan dan Pelayanan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
  - 1. Sub Bidang Pendataan;
  - 2. Sub Bidang Pelayanan, dan
  - 3. Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Pendapatan Daerah.

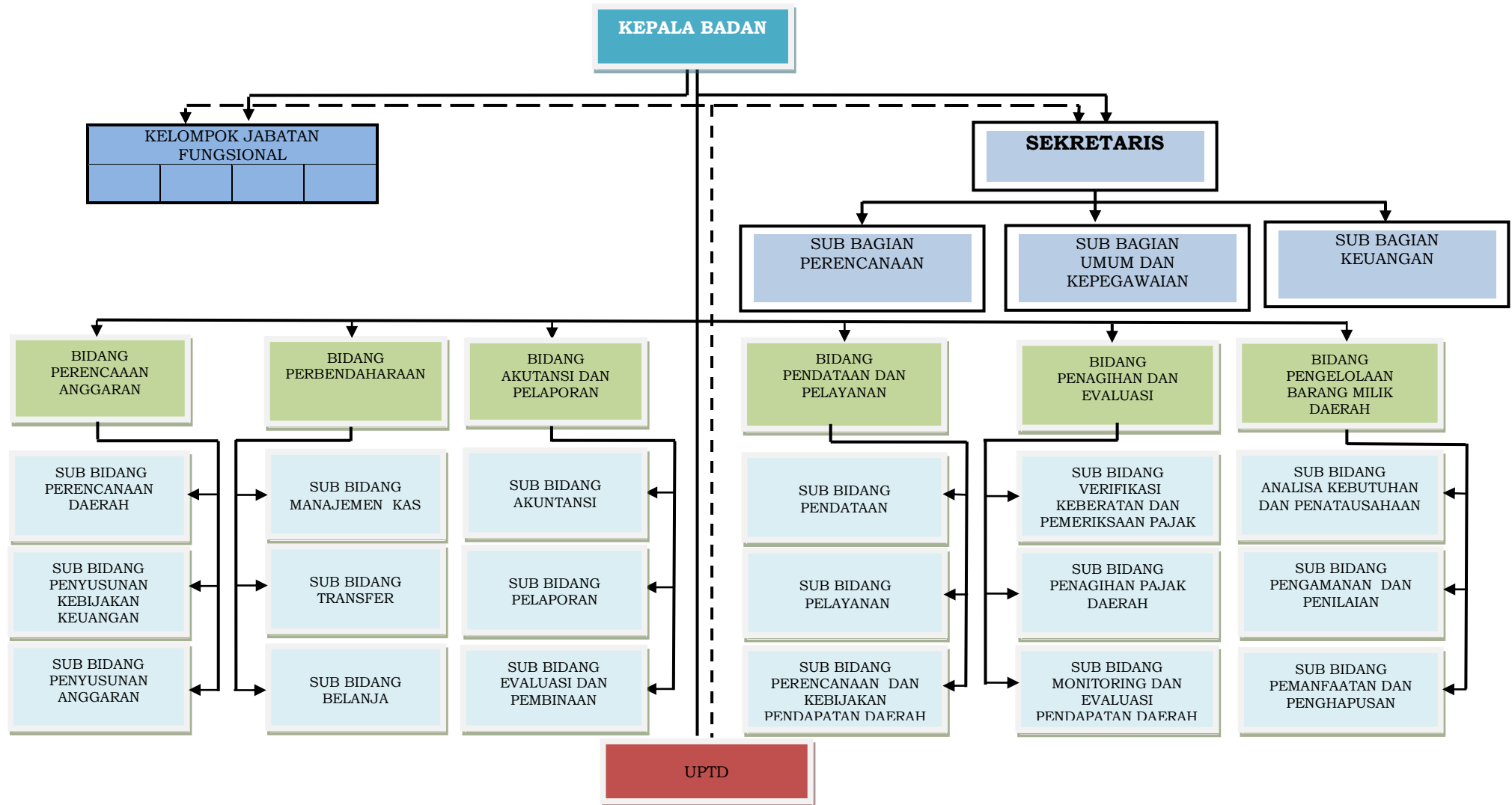


- f. Bidang Penagihan dan Evaluasi, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
  - 1. Sub Bidang Verifikasi Keberatan dan Pemeriksaan Pajak;
  - 2. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah, dan
  - 3. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
- g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
  - 1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan;
  - 2. Sub Bidang Pengamanan dan Penilaian, dan
  - 3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan.

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN NOMENKALTUR JABATAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TIPE A

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR : 75 TAHUN 2020  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukungnya. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi. Dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada tahun 2020 mempunyai personil sebanyak 343 (tiga ratus empat puluh tiga) orang yang terdiri dari :

1. PNS berjumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang
2. Pegawai Harian berjumlah 4 (empat) orang
3. Pegawai Kontrak berjumlah 207 (dua ratus tujuh) orang

Dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

#### 1. Data PNS

**Tabel 2.1 Data PNS berdasarkan Pangkat/Golongan**

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Juru Muda (I/a)	-	-	-
2	Juru (I/c)	2	-	2
3	Juru Tk. I (I/d)	2	1	3
4	Pengatur Muda (II/a)	1	-	1
5	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	6	1	7
6	Pengatur (II/c)	22	5	27
7	Pengatur Tk. I (II/d)	12	5	17
8	Penata Muda (III/a)	16	6	22
9	Penata Muda Tk. I (III/b)	9	8	17
10	Penata (III/c)	5	8	13
11	Penata Tk. I (III/d)	10	5	15
12	Pembina (IV/a)	1	2	3
13	Pembina Tk. I (IV/b)	-	-	-
14	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
<b>TOTAL :</b>		<b>87</b>	<b>41</b>	<b>128</b>

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian BPKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

2. Data Tenaga Harian di sekretariat dan bidang-bidang sampai dengan Tahun 2020

**Tabel 2.2 Data Tenaga Harian**

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat	-	-	-
2	Bidang Perencanaan Daerah	-	-	-
3	Bidang Perbendaharaan	-	1	1
4	Bidang Akuntansi & Pelaporan	-	-	-
5	Bidang Pendataan & Pelayanan	-	-	-
6	Bidang Penagihan & Evaluasi	-	2	2
7	Bidang Pengelolaan BMD	-	-	-
8	UPTD PAD Buleleng I	-	1	1
9	UPTD PAD Buleleng II	-	-	-
10	UPTD PAD Buleleng III	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		-	<b>4</b>	<b>4</b>

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian BPKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

3. Data PNS Menurut Jenjang Pendidikan sampai dengan Tahun 2020

**Tabel 2.3 Data PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan sampai Tahun 2020**

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jml
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Badan	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	5	1	11	-	2	20
3	Bidang Perencanaan Daerah	1	6	-	3	-	-	10
4	Bidang Perbendaharaan	-	5	3	6	2	-	16
5	Bidang Akuntansi & Pelaporan	1	6	-	-	1	-	8
6	Bidang Pendataan & Pelayanan	-	9	1	4	-	-	14
7	Bidang Penagihan & Evaluasi	3	5	2	10	1	-	21
8	Bidang Pengelolaan BMD	1	3	-	9	-	-	13
9	UPTD PAD Buleleng I	-	3	-	6	-	-	9
10	UPTD PAD Buleleng II	1	1	-	5	-	-	7
11	UPTD PAD Buleleng III	-	2	-	7	-	-	9
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>45</b>	<b>7</b>	<b>61</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>128</b>

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian BPKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

4. Data Tenaga Kontrak di sekretariat dan bidang-bidang sampai dengan Tahun 2020

**Tabel 2.4 Data Tenaga Kontrak**

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat	23	21	44
2	Bidang Perencanaan Daerah	9	2	11
3	Bidang Perbendaharaan	9	11	20
4	Bidang Akuntansi & Pelaporan	5	9	14
5	Bidang Pendataan & Pelayanan	12	8	20
6	Bidang Penagihan & Evaluasi	12	13	25
7	Bidang Pengelolaan BMD	7	6	13
8	UPTD PAD Buleleng I	11	6	17

9	UPTD PAD Buleleng II	14	14	28
10	UPTD PAD Buleleng III	8	7	15
<b>JUMLAH</b>		<b>110</b>	<b>97</b>	<b>207</b>

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian BPKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

5. Data Tenaga Kontrak Menurut Jenjang Pendidikan

**Tabel 2.4 Daftar Tenaga Kontrak Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jml
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Sekretariat	-	19	-	24	1	-	44
2	Bidang Perencanaan Daerah	-	7	-	4	-	-	11
3	Bidang Perbendaharaan	-	13	5	2	-	-	20
4	Bidang Akuntansi & Pelaporan	-	10	1	3	-	-	14
5	Bidang Pendataan & Pelayanan	1	6	6	7	-	-	20
6	Bidang Penagihan & Evaluasi	1	16	1	7	-	-	25
7	Bidang Pengelolaan BMD	-	7	-	6	-	-	13
8	UPTD PAD Buleleng I	-	8	1	8	-	-	17
9	UPTD PAD Buleleng II	-	11	-	17	-	-	28
10	UPTD PAD Buleleng III	-	3	3	9	-	-	15
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>87</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>207</b>

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian BPKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

**2.2.2 Sarana dan Prasarana**

Sumber daya yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung di bidang pengelolaan keuangan dan peningkatan PAD. Sarana dan prasarana merupakan bagian pendukung dalam kinerja PD untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang sesuai dengan laporan pada Kartu Inventaris Barang (KIB B) Peralatan dan Mesin BPKPD tahun 2020 terdiri dari :

Tabel 2.5 Data Sarana dan Prasarana

No Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang
1	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN (RODA EMPAT)	11 Unit	Baik
2	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	1 Unit	Baik
3	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	152 Unit	Baik
4	UNIVERSAL TESTER (Scanner)	1 Unit	Baik
5	MEUBELAIR	724 Buah	Baik
6	MEJA DAN KURSI PEJABAT/PEGAWAI	150 Set	Baik
7	LAIN-LAIN MEJA DAN KURSI KERJA PEJABAT/PEGAWAI	21 Buah	Baik
8	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	77 Set	Baik
9	MONOPLANE CHAMBER (SIPKD)	14 Unit	Baik
10	CAMERA PHOTO MICROGRAPH	4 Unit	Baik
11	TV MONITOR (LED TV)	3 Unit	Baik
12	PRINTER	18 Unit	Baik
13	GENZET	1 Unit	Baik
14	ADAPTOR	22 Unit	Baik
15	KOMPUTER JARINGAN	41 Unit	Baik
16	PERSONAL KOMPUTER	184 Unit	Baik
17	LAPTOP/NOTEBOOK	121 Unit	Baik
18	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER (PRINTER/SCANNER)	194 Unit	Baik
19	LAIN-LAIN PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	45 Unit	Baik
20	PERALATAN JARINGAN	297 Unit	Baik
21	ALAT PENDINGIN (AC/KIPAS ANGIN, DLL)	79 Unit	Baik
22	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	9 Unit	Baik
23	PERALATAN ANTENA MF/MW	2 Unit	Baik
24	PERALATAN ANTENA UHF	26 Unit	Baik
25	SWITCHER/MENARA ANTENA	11 Unit	Baik

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian BPKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

Berdasarkan data tersebut diatas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya terhadap sumber daya PNS masih kurang, hal ini terkait dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku mempersyaratkan tenaga yang diharuskan adalah PNS, disamping itu dari jenjang pendidikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah kekurangan tenaga PNS dengan dasar pendidikan dari Informatika dan tenaga teknis informasi teknologi, hal ini dibutuhkan karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah melakukan sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD s.d Tahun 2020), SISMIOP dan SIMPAD secara *online* di seluruh Kabupaten Buleleng.

Sarana prasarana pendukung yang sudah ada sudah mencukupi, hanya saja perlu dilakukan perawatan untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas.

### 2.3. Kondisi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

#### Kabupaten Buleleng

Seiring dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka Badan Keuangan Daerah per tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah .

Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah meliputi 6 bidang yang terdiri dari :

#### a. Bidang Pendataan dan Pelayanan

- Penerbitan SK NJOP dan Kartu NOP (Mutasi Pecah 2 s.d 10 berkas, Mutasi Pecah > 10 berkas, Mutasi Penggabungan, Objek Pajak (OP) Baru)
- Penerbitan SK NJOP dan Kartu NOP (Mutasi Penuh dan Pembetulan)
- Aktifkan NOP (Nomor Objek Pajak)
- Validasi SSPD BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)
- Pembatalan / Penghapusan NOP PBB P2
- Pengurangan Ketetapan PBB P2 dan Keberatan atas NJOP PBB P2
- Penerbitan Tanda Terima Pelaporan SPTPD
- Penerbitan Surat Keterangan Lunas Pajak
- Mutasi 2 in 1 Service
- Pengurangan BPHTB

#### b. Bidang Penagihan dan Evaluasi

- Penagihan dan Pelelangan
- Penerbitan Surat Teguran Pajak Daerah
- Monitoring terhadap pelaporan pajak daerah
- Pemberian Penghargaan dan Cindramata Kepada Wajib Pajak Daerah Terbaik
- Pemenuhan kebutuhan karcis di OPD Pengguna karcis
- Porporasi/ pengesahan terhadap billing wajib pajak
- Prosedur Penilaian Desa Star Pajak
- Gebyar pengundian hadiah Pajak Bumi dan Bangunan

- c. Bidang Perbendaharaan
  - Pelaksanaan Pengelolaan Piutang Daerah
  - Pengelolaan Kas
  - Penerbitan SP2D
  - Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Penerimaan dan Belanja
  - Pelayanan SPD
  - Penerbitan SKPP
- d. Bidang Perencanaan Anggaran
  - Penyusunan Regulasi (Perbup/SK Bupati) Terkait Kebijakan Keuangan
  - Penyajian Informasi terkait Regulasi Kebijakan Keuangan
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
  - Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah
  - Rekonsiliasi Persediaan
  - Hibah Barang Milik Daerah
  - Pemusnahan Barang Milik Daerah
  - Penjualan Barang Milik Daerah
  - Pinjam Pakai Barang Milik Daerah
  - Sewa Barang Milik Daerah
  - Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian untuk Pengamanan Aset
  - Penilaian Barang Milik Daerah
  - Penyusunan Standar Satuan Harga

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan disusun standar operasional prosedur sebagai standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

#### 2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2017-2022 dengan realisasi pelaksanaannya. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.9**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKPD**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke				
			I	II	III	IV	V
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	- Terwujudnya PAD yang sesuai target	Jumlah realisasi PAD	335,555 M	440,092 M	470,000 M	484,102 M	500,000 M
	- Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	- Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	Prosentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik	-	-	-	95 %	100 %

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah baru sehingga dalam penetapan Renstra tahun 2017-2022 tidak dapat di ukur namun indikator yang diukur adalah realisasi kalau dilihat dari tabel tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan demikian juga opini dari BPK terus meningkat penilaiannya, jadi dapat dikatakan bahwa kinerja dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berhasil dan terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Struktur APBD dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
**Struktur APBD Tahun 2019 dan 2020**

No	Uraian	Pagu 2019		%	Pagu 2020
		Anggaran	Realisasi		Anggaran
1	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2,414,886,856,533.00</b>	<b>2,318,758,511,591.59</b>	<b>96.02</b>	<b>2,060,019,194,516.13</b>
	Pendapatan Asli Daerah	444,111,759,000.00	365,595,301,712.57	82.32	335,072,650,874.71
	Dana Perimbangan	1,333,167,172,136.00	1,331,020,351,719.00	99.84	1,185,907,172,000.00
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	637,607,925,397.00	622,142,858,160.02	97.57	539,039,371,641.42
2	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2,456,105,127,676.71</b>	<b>2,284,243,845,385.80</b>	<b>93.00</b>	<b>2,131,452,131,865.63</b>
	Belanja Tidak Langsung	1,228,724,051,189.86	1,202,450,385,123.35	97.86	1,167,468,003,488.30
	Belanja Langsung	1,227,381,076,486.85	1,081,793,460,262.45	88.14	963,984,128,377.33
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(41,218,271,143.71)</b>	<b>34,514,666,205.79</b>	<b>-83.74</b>	<b>(71,432,937,349.50)</b>
3	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>41,218,271,143.71</b>	<b>41,318,271,143.71</b>	<b>100.24</b>	<b>71,432,937,349.50</b>
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	86,475,714,227.71	56,475,714,227.71	65.31	105,832,937,349.50
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	45,257,443,084.00	15,157,443,084.00	33.49	34,400,000,000.00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>75,832,937,349.50</b>		

Sumber : Bidang Akuntansi & Pelaporan BPKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2019 & Tahun 2020

Jika dilihat perbandingan pagu sesuai pagu anggaran dapat dilihat pada tabel berikut : tahun 2018 sampai dengan 2019 sebagai berikut

**Table 2.7**  
**Perbandingan Pagu Sesuai Anggaran Perubahan**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ( BPKPD )**

NO	TAHUN	PAGU		TOTAL PAGU
		BL	BTL	
1	2019	36.847.556.916,00	16.753.056.083,86	53.600.612.999,86
2	2020	20.060.921.238,00	111.731.662.461,19	131.792.583.699,19

Sumber : Bidang Akuntansi & Pelaporan BPKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2019 & Tahun 2020

Kondisi alokasi total anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng di tiap tahunnya berfluktuasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel tersebut diatas.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada tahun 2020 mengelola anggaran sebesar Rp. 131.792.583.699,00 yang terdiri dari 14 Program dan 60 Kegiatan, dimana 6 Program merupakan program unggulan. Berikut adalah tabelnya :

Tabel 2.12  
Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2019 – 2020

No	Kode	Program dan Kegiatan	Tahun Anggaran			
			2019 (BKD)	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>5,123,995,345.55</b>	<b>4,938,722,375.00</b>	<b>5,310,801,726.36</b>	<b>5,712,715,341.58</b>
	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28,100,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00
	002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	513,865,000.00	501,000,000.00	586,801,726.36	600,000,000.00
	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	335,233,540.00	330,000,000.00	350,000,000.00	400,000,000.00
	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	28,500,000.00	163,722,375.00	200,000,000.00	250,000,000.00
	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,375,766,224.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,500,000,000.00
	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	283,696,000.00	300,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00
	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	145,981,400.00	100,000,000.00	150,000,000.00	200,000,000.00
	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43,479,000.00	60,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	296,772,700.00	160,000,000.00	200,000,000.00	250,000,000.00
	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	957,318,595.55	800,000,000.00	800,000,000.00	878,715,341.58
	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12,276,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	288,120,500.00	320,000,000.00	320,000,000.00	320,000,000.00
	018	Rapat-rapat dan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	461,126,386.00	300,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00
	022	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	353,760,000.00	460,000,000.00	460,000,000.00	460,000,000.00
<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>4,493,484,668.00</b>	<b>2,464,358,200.00</b>	<b>2,650,021,000.00</b>	<b>2,850,570,700.00</b>
	003	Pembangunan Gedung Kantor	201,080,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	250,000,000.00
	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2,362,300,000.00	475,000,000.00	475,000,000.00	475,000,000.00
	010	Pengadaan Meubelair	236,801,984.00	115,000,000.00	115,000,000.00	225,549,700.00
	012	Penyelenggaraan dan pengadaan sarana /prasarana upacara	182,140,500.00	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00
	019	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	118,859,400.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
	022	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	760,152,350.00	473,121,976.00	550,000,000.00	550,000,000.00
	024	Pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operasional	381,181,748.00	452,676,004.00	500,000,000.00	500,000,000.00
	026	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	57,464,850.00	171,759,500.00	190,000,000.00	190,000,000.00
	030	Pemeliharaan rutin /berkala alat - alat kantor/RT	29,450,000.00	92,565,000.00	115,021,000.00	115,021,000.00
	045	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	164,053,836.00	164,235,720.00	185,000,000.00	185,000,000.00
<b>3</b>	<b>03</b>	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>256,640,500.00</b>	<b>450,562,200.00</b>	<b>484,507,200.00</b>	<b>521,174,000.00</b>
	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	85,145,500.00	91,000,000.00	91,000,000.00	91,000,000.00
	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	123,495,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
	006	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	48,000,000.00	139,562,200.00	173,507,200.00	210,174,000.00

No	Kode	Program dan Kegiatan	Tahun Anggaran			
			2019 (BKD)	2020	2021	2022
4	06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>60,929,136.00</b>	<b>70,364,800.00</b>	<b>75,666,100.00</b>	<b>81,392,400.00</b>
	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	19,948,500.00	21,450,000.00	31,600,900.00	37,327,200.00
	003	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	17,391,000.00	18,700,000.00	18,700,000.00	18,700,000.00
	004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	23,589,636.00	30,214,800.00	25,365,200.00	25,365,200.00
5	07	<b>Program Perencanaan Anggaran SKPD</b>	<b>218,205,547.00</b>	<b>223,125,900.00</b>	<b>239,936,000.00</b>	<b>258,094,000.00</b>
	01	Penyusunan Anggaran SKPD	218,205,547.00	223,125,900.00	239,936,000.00	258,094,000.00
6	09	<b>Program Peningkatan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan</b>	<b>2,790,148,767.00</b>	<b>3,617,202,400.00</b>	<b>3,889,719,500.00</b>	<b>4,184,087,800.00</b>
	01	Penyelenggaraan dan Pengembangan Aplikasi serta Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	2,790,148,767.00	3,617,202,400.00	3,889,719,500.00	4,184,087,800.00
7	15	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>1,586,323,814.00</b>	<b>1,400,000,000.00</b>	<b>1,650,000,000.00</b>	<b>1,700,000,000.00</b>
	002	Penyusunan Standar Satuan Harga	462,023,814.00	500,000,000.00	550,000,000.00	550,000,000.00
	005	Penyusunan Kebijakan Pendapatan	702,000,000.00	450,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
	025	Monitoring dan Evaluasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	201,300,000.00	250,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
	031	Penyuluhan dan Sosialisasi Pendapatan Daerah	221,000,000.00	200,000,000.00	300,000,000.00	350,000,000.00
8	17	<b>Program Peningkatan Pelayanan Anggaran Daerah</b>	<b>5,398,120,324.00</b>	<b>5,649,150,800.00</b>	<b>6,074,753,300.00</b>	<b>6,534,481,800.00</b>
	002	Penyusunan Kebijakan Pedoman Pelaksanaan APBD	989,120,324.00	1,009,806,800.00	1,100,000,000.00	1,200,000,000.00
	003	Pembinaan dan Penyajian Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	563,000,000.00	350,000,000.00	400,000,000.00	450,000,000.00
	004	Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD	2,926,000,000.00	3,239,344,000.00	3,500,000,000.00	3,684,481,800.00
	005	Penyusunan Pergeseran APBD	650,300,000.00	650,000,000.00	674,753,300.00	700,000,000.00
	006	Pengesahan DPA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD	269,700,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	500,000,000.00

No	Kode	Program dan Kegiatan	Tahun Anggaran			
			2019 (BKD)	2020	2021	2022
9	18	<b>Program Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Keuangan Daerah</b>	<b>3,270,075,807.00</b>	<b>4,504,052,900.00</b>	<b>4,843,384,600.00</b>	<b>5,209,924,900.00</b>
	001	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan - Kebijakan Perbendaharaan	299,944,500.00	350,000,000.00	403,384,600.00	420,000,000.00
	002	Pembinaan penyusunan pengeluaran kas dan penetapan SPD	449,483,307.00	670,000,000.00	700,000,000.00	750,000,000.00
	003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan gaji PNSD	607,100,000.00	870,000,000.00	900,000,000.00	950,000,000.00
	004	Pelaksanaan pengendalian APBD dan penatausahaan dana transfer	397,965,600.00	400,000,000.00	450,000,000.00	500,000,000.00
	005	Pelaksanaan penatausahaan dan penerbitan SP2D Belanja Langsung	564,879,000.00	864,052,900.00	900,000,000.00	1,009,924,900.00
	006	Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUD, Penyimpanan Bukti Asli Kepemilikan Kekayaan Daerah	117,726,900.00	300,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00
	007	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung	471,000,000.00	550,000,000.00	600,000,000.00	630,000,000.00
	008	Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Tidak Langsung	66,200,000.00	200,000,000.00	220,000,000.00	250,000,000.00
	010	Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	295,776,500.00	300,000,000.00	320,000,000.00	350,000,000.00
10	19	<b>Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>2,864,815,867.00</b>	<b>3,522,119,200.00</b>	<b>3,787,472,800.00</b>	<b>4,074,103,200.00</b>
	001	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah	88,643,056.40	130,000,000.00	157,472,800.00	184,103,200.00
	002	Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	508,749,257.80	850,000,000.00	900,000,000.00	940,000,000.00
	003	Pemantauan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank/Lembaga Keuangan Lainnya yang ditunjuk	21,870,800.00	75,000,000.00	80,000,000.00	120,000,000.00
	004	Pelaksanaan Pengelolaan Hutang dan Piutang Daerah dan Pengelolaan / Menatausahakan Investasi Daerah	637,289,352.80	340,000,000.00	400,000,000.00	440,000,000.00
	005	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	488,569,000.00	1,040,000,000.00	1,100,000,000.00	1,135,000,000.00
	006	Pembinaan dan Evaluasi Akuntansi Keuangan Daerah	161,853,900.00	277,119,200.00	300,000,000.00	335,000,000.00
	007	Pelaporan dan Pengembangan Aplikasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	372,001,000.00	420,000,000.00	450,000,000.00	485,000,000.00
	008	Pemantauan dan Tindak Lanjut Kerugian Daerah	585,839,500.00	390,000,000.00	400,000,000.00	435,000,000.00

No	Kode	Program dan Kegiatan	Tahun Anggaran			
			2019 (BKD)	2020	2021	2022
11	20	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Analisa Kebutuhan Aset</b>	<b>1,457,516,812.00</b>	<b>1,390,782,200.00</b>	<b>1,495,562,600.00</b>	<b>1,608,744,600.00</b>
	002	Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Aset/Barang Milik Daerah	183,731,000.00	250,000,000.00	300,000,000.00	350,000,000.00
	005	Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Untuk Pengamanan Barang	673,573,300.00	680,000,000.00	700,000,000.00	750,000,000.00
	006	Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah	600,212,512.00	460,782,200.00	495,562,600.00	508,744,600.00
12	21	<b>Program Peningkatan Pelayanan Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset</b>	<b>1,849,266,613.00</b>	<b>2,890,059,300.00</b>	<b>3,107,794,000.00</b>	<b>3,342,987,400.00</b>
	001	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	316,612,913.00	400,000,000.00	450,000,000.00	500,000,000.00
	002	Pelaksanaan Penatausahaan/Inventarisasi Barang/Aset Daerah	257,331,500.00	1,290,000,000.00	1,320,000,000.00	1,370,000,000.00
	003	Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	503,112,800.00	400,000,000.00	440,000,000.00	490,000,000.00
	004	Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah	567,432,400.00	460,000,000.00	500,000,000.00	540,000,000.00
	005	Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	204,777,000.00	340,059,300.00	397,794,000.00	442,987,400.00
13	22	<b>Program Peningkatan dan Pelayanan PAD</b>	<b>5,019,900,000.00</b>	<b>5,270,000,000.00</b>	<b>5,638,509,300.00</b>	<b>6,503,350,600.00</b>
	001	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penagihan Pajak Daerah	863,618,600.00	950,000,000.00	950,500,000.00	1,153,350,600.00
	002	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah dengan Sistem Online	449,600,000.00	400,000,000.00	500,000,000.00	650,000,000.00
	003	Pelayanan administrasi dan informasi pajak daerah	1,074,000,000.00	1,200,000,000.00	1,300,000,000.00	1,400,000,000.00
	004	Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan bukan pajak daerah	723,300,000.00	800,000,000.00	894,000,000.00	950,000,000.00
	005	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah (UPTD Buleleng I)	602,400,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	800,000,000.00
	006	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah (UPTD Buleleng II)	866,581,400.00	870,000,000.00	894,009,300.00	950,000,000.00
	007	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah (UPTD Buleleng III)	440,400,000.00	450,000,000.00	500,000,000.00	600,000,000.00
14	23	<b>Program Pendataan dan Pengembangan PAD</b>	<b>2,458,133,715.45</b>	<b>4,571,578,400.00</b>	<b>4,800,000,000.00</b>	<b>4,800,000,000.00</b>
	001	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penetapan Pajak Daerah	640,733,715.45	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
	002	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Daerah	1,265,000,000.00	3,291,578,400.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
	003	Verifikasi data dan keberatan pajak daerah	552,400,000.00	480,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
		<b>JUMLAH :</b>	<b>36,847,556,916.00</b>	<b>40,962,078,675.00</b>	<b>44,048,128,126.36</b>	<b>47,381,626,741.58</b>

### 2.5. Fokus Layanan Urusan Pengelolaan Keuangan

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Terjadinya pembangunan di suatu negara atau daerah ditandai dengan beberapa aktivitas perekonomian seperti meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan tingkat kesejahteraan. Ada tiga masalah pokok yang harus diperhatikan dalam mengukur pembangunan suatu negara atau daerah, yaitu 1) Apa yang terjadi pada tingkat kemiskinan, 2) Apa yang terjadi terhadap pengangguran, dan 3) Apa yang terjadi terhadap ketimpangan dalam berbagai bidang. Ketiga masalah pokok tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antara satu dan lainnya. Tingginya tingkat kemiskinan dikarenakan banyaknya pengangguran yang kemudian berdampak pada ketimpangan dalam berbagai bidang. Dengan kata lain, bila salah satu dari tiga hal tersebut mengalami gangguan atau guncangan, maka dua hal yang lainnya juga mengalami dampaknya. Dalam hal ini, pendapatan dan belanja daerah dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengatasi kemiskinan. Pendapatan daerah tersebut mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan belanja daerah mencakup belanja pembangunan.

### 2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Berdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama ini terdapat tantangan dan peluang eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng untuk tahun 2017-2022, yaitu:

### 2.6.1. Analisis Lingkungan Internal

#### 1. Analisis Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah :

- a. Tujuan yang jelas;
- b. Adanya dukungan dana yang cukup;
- c. SDM yang memadai dari segi jumlah dan latar belakang pendidikannya;
- d. Struktur organisasi yang jelas;
- e. Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan ;

#### 2. Analisis Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan – kelemahan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah antara lain :

- a. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPKPD masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. Manajemen anggaran yang tidak tepat dalam rangka peningkatan SDM;
- c. Masih terdapatnya tumpang tindih tugas pokok fungsi beberapa bagian dengan dinas/instansi lain, berkenaan dengan pembentukan struktur organisasi yang baru;
- d. Masih kurangnya tingkat koordinasi antar bidang;
- e. Sering terlambatnya penyediaan dana yang berakibat pada tidak tepatnya pelaksanaan tugas;
- f. Padatnya volume pekerjaan;



### 2.6.2. Analisis Lingkungan Eksternal

#### 1. Analisis Peluang (*Opportunities*)

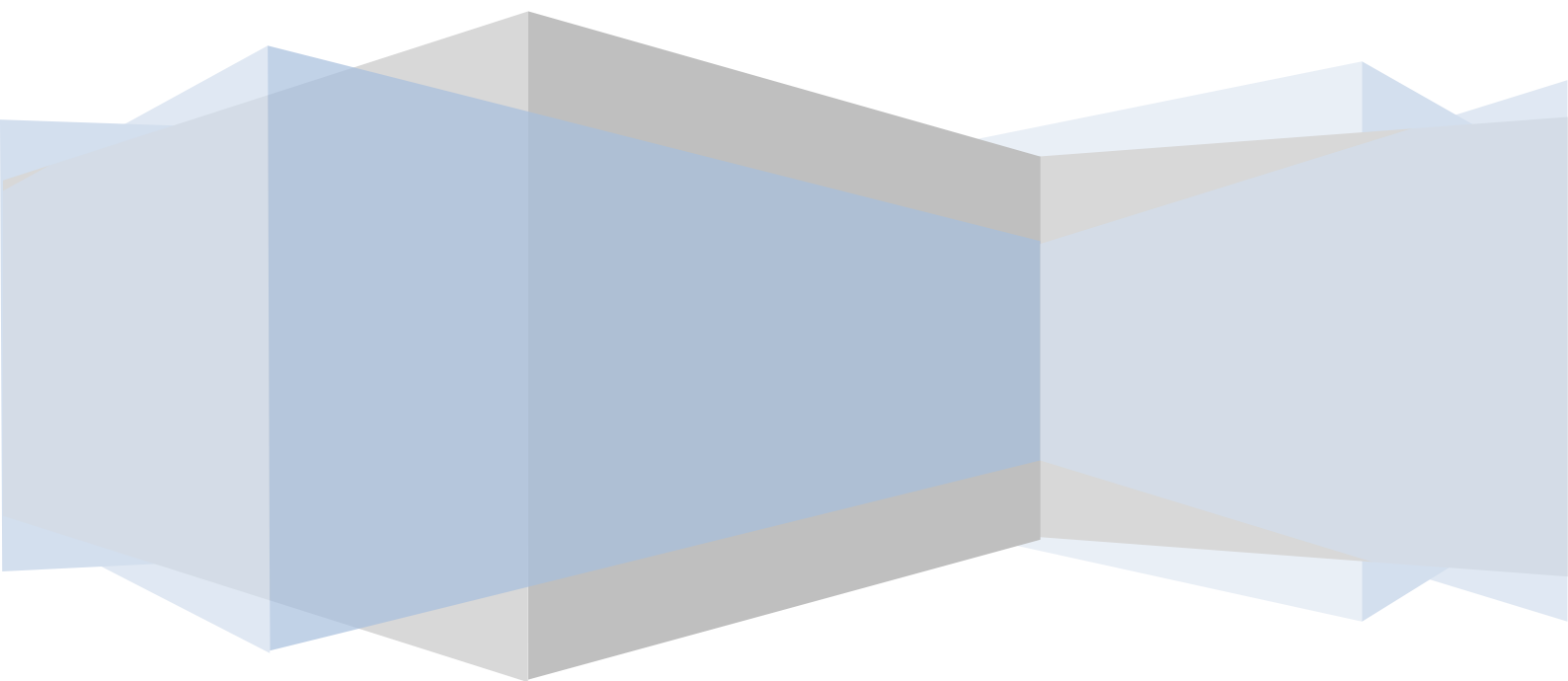
Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluang – peluang yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian informasi yang cepat dan tepat;
- b. Berkembangnya sarana komunikasi global, memberikan peluang untuk mempromosikan secara efektif mengenai profil Kabupaten dan potensi di segala bidang yang ada termasuk bagaimana tentang sistem pengelolaan keuangan daerah;

#### 2. Analisis Tantangan (*Threats*) :

- a. Mempertahankan opini WTP
- b. Perubahan aturan yang cepat mendorong penatausahaan keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang ada.
- b. Pemeriksaan bertumpuk dalam waktu bersamaan.
- c. Kebebasan dalam mengakses informasi keuangan melalui dunia digital menuntut kesiapan dalam mewujudkan akuntabilitas.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN**  
**ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**



### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Permasalahan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng merupakan salah satu bagian dari Permasalahan Pembangunan daerah. Perlunya dilakukan identifikasi permasalahan agar menjadi acuan yang jelas, tepat, dan membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kinerja pengelolaan keuangan baik dari segi pendapatan dan belanja perlu ditingkatkan sehingga lebih optimal lagi.
2. Kinerja Penganggaran masih perlu ditingkatkan baik dari segi ketepatan alokasi maupun ketepatan dana;
3. Kinerja Pengelolaan Aset perlu ditingkatkan baik dari perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pemanfaatan penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian.
4. Kinerja Laporan Keuangan masih perlu ditingkatkan untuk mempertahankan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang WTP;

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta hasil analisis permasalahan dan isu strategis Kabupaten Buleleng yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, maka untuk memajukan Kabupaten Buleleng ke depan ditetapkan visi RPJMD Kabupaten Buleleng periode 2017-2022 adalah sebagai berikut:

**”Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana”**

**Visi** itu bermakna sebagai berikut:

1. *Mandiri* mengandung makna: Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. *Sejahtera* mengandung makna: Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.

3. *Berdaya Saing* mengandung makna: Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
4. Berlandaskan *Tri Hita Karana* mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

### Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka tindakan yang akan dilakukan selama periode 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng terpilih periode 2017-2022, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkannya. Keterkaitan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng dengan Misi Pertama RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah bertanggung jawab atas meningkatnya PAD dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Terlaksananya fungsi tersebut menjadi salah satu faktor pendukung terwujudnya kemandirian daerah didalam pembiayaan pembangunan daerah secara mandiri.

Tabel 3.1  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan.</li> <li>2. Meningkatnya akses dan kesempatan kerja penduduk usia kerja /produktif.</li> <li>3. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin.</li> <li>4. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah untuk pembiayaan pembangunan.</li> </ol>
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah	Berkembangnya produk unggulan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya nilai produk pertanian.</li> <li>2. Berkembangnya industri berbasis komoditas unggulan daerah</li> <li>3. Meningkatnya jumlah dan daya saing UMKM dan koperasi.</li> </ol>
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan berintegritas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan.</li> <li>2. Meningkatnya kualitas pemuda dan olah raga.</li> <li>3. Meningkatnya status kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan.</li> <li>4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</li> </ol>
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan	Semakin mantapnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.</li> </ol>
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik.</li> </ol>
6. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan ( Sustainable Development)	Terwujudnya Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal.</li> <li>2. Terjaganya kualitas lingkungan hidup.</li> </ol>

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng mendukung terwujudnya visi maka melaksanakan misi yang ke-1 yaitu “*Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif*”.

### 3.2.1. Tujuan

Mengacu pada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik, maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
2. Berkembangnya produk unggulan daerah
3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang professional, berbudaya dan berintegritas
4. Semakin mantapnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik
6. Terwujudnya Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan

### 3.2.2. Sasaran

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Misi I : Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;

Sasaran :

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan.
- b. Meningkatnya akses dan kesempatan kerja penduduk usia kerja /produktif.
- c. Meningkatnya perlindungan sosialterhadap masyarakat miskin.
- d. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah untuk pembiayaan pembangunan.

2. Misi II : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah;

Sasaran :

- a. Meningkatnya nilai produk pertanian.
- b. Berkembangnya industri berbasis komoditas unggulan daerah

- c. Meningkatnya jumlah dan daya saing UMKM dan koperasi.
- 3. Misi III : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;  
Sasaran :
  - a. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
  - b. Meningkatkan kualitas pemuda dan olah raga.
  - c. Meningkatnya status kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan.
  - d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- 4. Misi IV : Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;  
Sasaran :
  - a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan .
- 5. Misi V : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;  
Sasaran :
  - a. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik.
- 6. Misi VI : Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan (*Sustainable Development*)  
Sasaran :
  - a. Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal. Terjaganya kualitas lingkungan hidup.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Restra Provinsi Bali.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lampiran I (Narasi RPJMN 2020-2024) disebutkan 5 (lima) arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Renstra BPKAD Provinsi Bali mewajibkan mampu menjabarkan agenda pembangunan nasional, visi dan misi Kementerian, visi dan misi Gubernur Bali, serta mampu menyesuaikan dengan dinamika kebijakan keuangan dan aset daerah yang berkembang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa Pimpinan

Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dalam Renstra Kementerian Keuangan disebutkan visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah : *Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi

**Tujuan Kementerian Keuangan pada Tahun 2020-2024 yaitu:**

Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.



Sasaran Strategis Kementerian Keuangan :

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:
  - a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
  - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
  - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
  - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
  - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
  - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal

Telaahan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional dan Daerah selalu bersinergi untuk menjamin bahwasannya proses keuangan antara pusat dan daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **3.4 Telaah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

#### **3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buleleng tahun 2013 - 2033 yang memosisikannya sebagai bagian dalam Provinsi Bali, yaitu di BPKPD sebagai sebagai

*leading sector* bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan adalah memaksimalkan potensi yang ada di Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan pendapatan dimana program Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota adalah strategi pengembangan wilayah-wilayah berbasis pariwisata.

### 3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap kebijakan, rencana, dan program pembangunan, termasuk RPJMD merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kewajiban melaksanakan KLH RPJMD juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna memenuhi ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup dan perencanaan pembangunan telah melakukan KLHS terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Sebelum Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 diajukan ke DPRD untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan, Rancangan Dokumen RPJMD tersebut dilengkapi dengan Dokumen KLHS yang telah divalidasi oleh Gubernur Bali melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

Isu-isu strategis lingkungan hidup Kabupaten Buleleng yang dirumuskan berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) adalah sebagai berikut.

1. Menurunnya kondisi daerah aliran sungai (DAS);
2. Pencemaran lingkungan oleh air limbah;
3. Buruknya sanitasi lingkungan, terutama karena pengelolaan persampahan yang belum optimal;
4. Kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang dan padang lamun;

5. Ancaman perubahan iklim.
6. Rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat, terutama generasi muda;
7. Daya saing UMKM masih rendah;
8. Kondisi ekonomi perdesaan belum mampu mencegah migrasi tenaga kerja produktif ke wilayah perkotaan ataupun ke luar daerah;
9. Pendapatan perkapita penduduk masih rendah dan belum merata;
10. Iklim investasi belum kondusif;
11. Kondisi infrastruktur kawasan strategis belum optimal;
12. Kesenjangan ekonomi antar wilayah perdesaan dan kecamatan masih tinggi;
13. Lunturnya kearifan lokal karena meningkatnya pengaruh budaya asing;
14. Pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi dan persebaran penduduk tidak merata;
15. Kemiskinan dan pengangguran;
16. PMKS dan pelayanan sosial;
17. Pelestarian budaya;
18. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum optimal;
19. Mutu dan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng masih menghadapi beberapa isu strategis yang dapat dianalisa yaitu :

1. Data potensi pajak daerah yang kurang akurat dan lengkap.  
Data potensi pajak daerah yang kurang akurat dan optimal sangat mempengaruhi jumlah PAD yang dihasilkan dari pajak daerah. Untuk itu diperlukan suatu sistem guna meningkatkan kualitas serta mengoptimalkan data potensi pajak daerah.
2. Manajemen Pendapatan Daerah yang perlu disempurnakan.  
Perencanaan, aspek kelembagaan, sudah ditertibkan melalui Perda dan Perbup Kabupaten Buleleng yang menerangkan tugas pokok dan fungsi dari SKPD. Keterkaitan visi dan misi dari RPJMD dikatakan penting karena melalui visi dan misi ini sebuah organisasi memiliki kejelasan arah dan tujuan jelas yang ingin dicapai. Jadi tiadanya visi dan misi RPJMD yang didukung oleh SKPD maka SKPD tersebut akan bekerja tanpa target dan cita-cita yang jelas.
3. Terbatasnya dana biaya Monev dan penyuluhan pajak.  
Dengan luasnya wilayah Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 148 desa/kelurahan, pelaksanaan monev dan penyuluhan tidaklah optimal dilaksanakan.

4. Kurangnya sumber daya manusia dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

Dengan berkembangnya system dan regulasi terkait pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang cukup dan mumpuni guna dapat mewujudkan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang berkualitas.

5. Belum mampu menetapkan sanksi perpajakan.

Sampai saat ini belum ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Buleleng untuk menindak tegas bagi petugas yang telah menyalahi uang pajak, dan bagi wajib pajak yang menunggak membayar pajak.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, maka peranan BPKPD sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Permasalahan pokok yang sedang dialami oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng adalah **"Masih rendahnya PAD, Kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah masih belum optimal"**. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Buleleng PAD masih rendah dan Kemampuan pengelolaan

keuangan dan aset daerah masih belum optimal dan dengan potensi yang ada akan dimaksimalkan.

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan sebagaimana telah diuraikan di sub bab diatas, juga berasal dari analisis lingkungan eksternal. Di samping harus mampu menciptakan peluang, sekaligus harus mampu memanfaatkan berbagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

### 3.5.1 Faktor Internal

Faktor internal yang bersumber dari dalam organisasi dan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat berupa kekuatan (*strengths*) dan ada yang berupa kelemahan (*weaknesses*). Faktor kekuatan dan kelemahan dimaksud adalah sebagai berikut:

#### 1. Kekuatan (*Strengths*)

Isu strategis yang merupakan faktor kekuatan merupakan faktor pendukung dan pemicu dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD. Adapun faktor kekuatan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng adalah:

- a. Letak geografis yang strategis
- b. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan penerimaan daerah;
- c. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perijinan sebagai panduan dalam melaksanakan mekanisme pelayanan yang berhubungan dengan PAD;
- d. Tersedianya Peraturan perundang-undangan sebagai pendukung pelaksanaan Tupoksi di antaranya:
  - 1) Peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur kebijakan pendapatan;
  - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
  - 3) Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

4) Adanya Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas;

## 2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Isu strategis yang merupakan faktor kelemahan yang menjadi kendala/penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja adalah sebagai berikut.

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia khususnya Tenaga di Bidang Pelayanan dan Penagihan PAD;
- b. Terbatasnya dana/anggaran yang dialokasikan untuk mengoptimalkan pendapatan;
- c. Pendataan wajib pajak yang belum optimal;
- d. Belum maksimalnya penerapan sistem teknologi informasi dalam pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;

### 3.5.2 Faktor Eksternal

Selain faktor internal, Isu strategis faktor eksternal juga berpengaruh terhadap kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Identifikasi faktor eksternal ada yang berupa peluang (*Opportunities*) dan ada yang berupa ancaman (*Threats*). Adapun faktor peluang dan faktor ancaman dimaksud adalah:

#### 1. Peluang (*Opportunities*)

Isu strategis faktor peluang merupakan isu strategis yang berasal dari luar SKPD yang memberikan dorongan/dukungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas. Adapun isu strategis yang merupakan faktor peluang adalah:

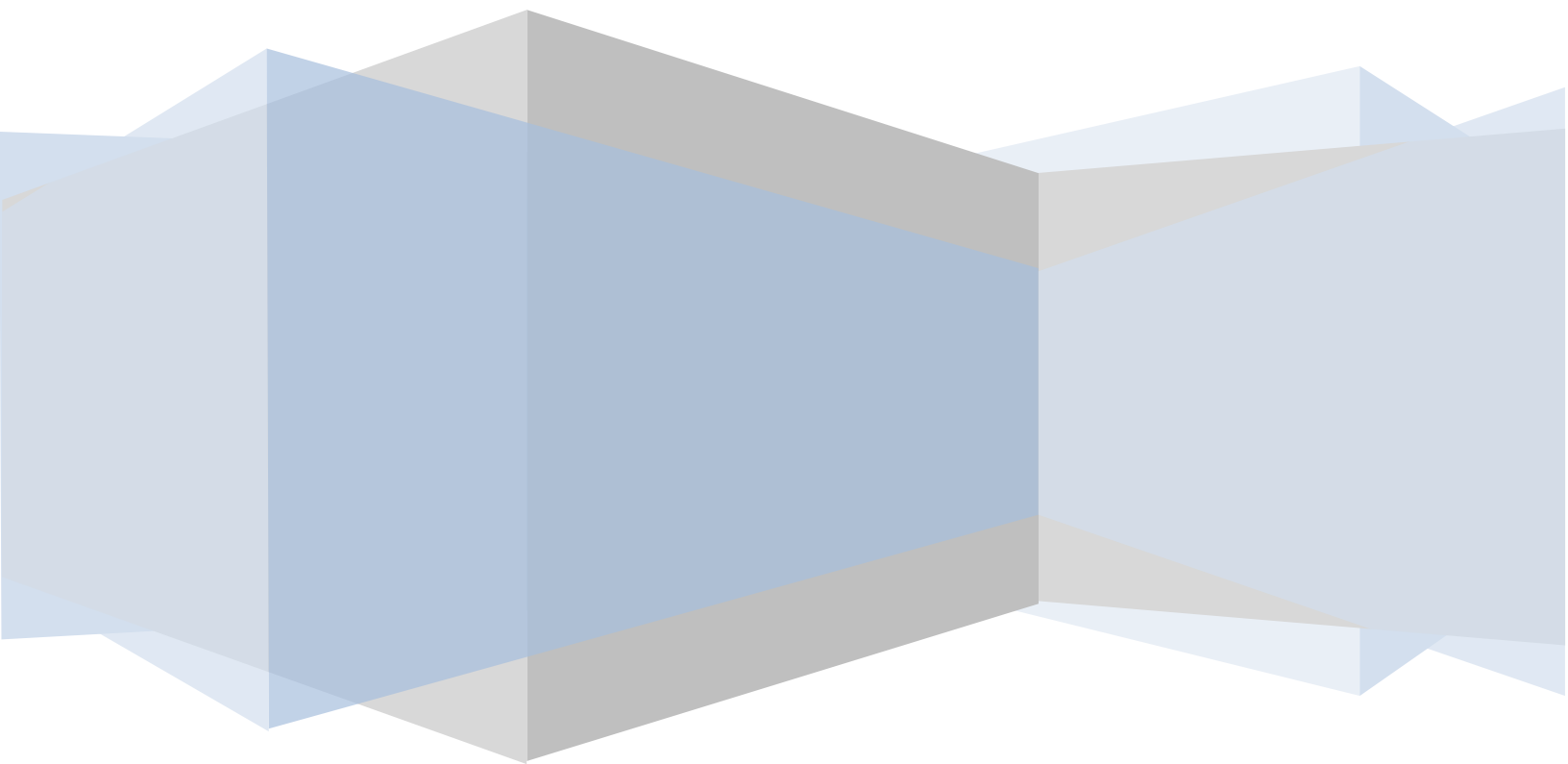
- a. Pelaksanaan Otonomi Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam rangka meningkatkan pengalihan potensi yang dimiliki daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah.
- b. Penerapan Pelayanan berbasis IT.
- c. Pelayanan terhadap layanan terkait PAD sudah lebih baik.
- d. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kemampuan untuk membayar pajak meningkat.

## 2. Tantangan/Ancaman (*Threats*)

Isu strategis yang merupakan faktor ancaman/tantangan adalah merupakan isu strategis yang berasal dari luar SKPD yang menjadi tantangan/kendala/ancaman dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD . Adapun faktor ancaman dimaksud adalah :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.;
- b. Regulasi yang terus mengalami perubahan sehingga berimbas pada tindak lanjut di lapangan.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**BADAN PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN PENDAPATAN**  
**DAERAH KABUPATEN**  
**BULELENG**





**BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BULELENG**

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka yang perlu dipertimbangkan adalah visi dan misi Kabupaten Buleleng. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada pernyataan visi dan misi pembangunan Kabupaten Buleleng, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya PAD.
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan.
3. Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng dengan merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU
Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya PAD	Terwujudnya PAD sesuai target	Meningkatnya Jumlah data dan penetapan PAD	Jumlah Realisasi PAD
		Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas Tata Kelola keuangan daerah	Tersusunnya APBD tepat waktu	Meningkatnya Jumlah pelayanan, penerimaan dan penagihan PAD	Opini WTP dari BPK
						Terwujudnya dokumen APBD yang berkualitas dan tepat waktu	

					Meningkatnya pelayanan dan penatausahaan keuangan daerah	Terwujudnya dokumen perbendaharaan yang sesuai regulasi dan tepat waktu	
					Terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang memadai dan tepat waktu	Terwujudnya dokumen LKPD yang tepat waktu	
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	Prosentase pengelolaan barang milik daerah yang baik	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah	Terwujudnya dokumen pengelolaan barang milik daerah yang berkualitas	Prosentase pengelolaan BMD yang baik

Sasaran yang didukung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng terkait Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah :

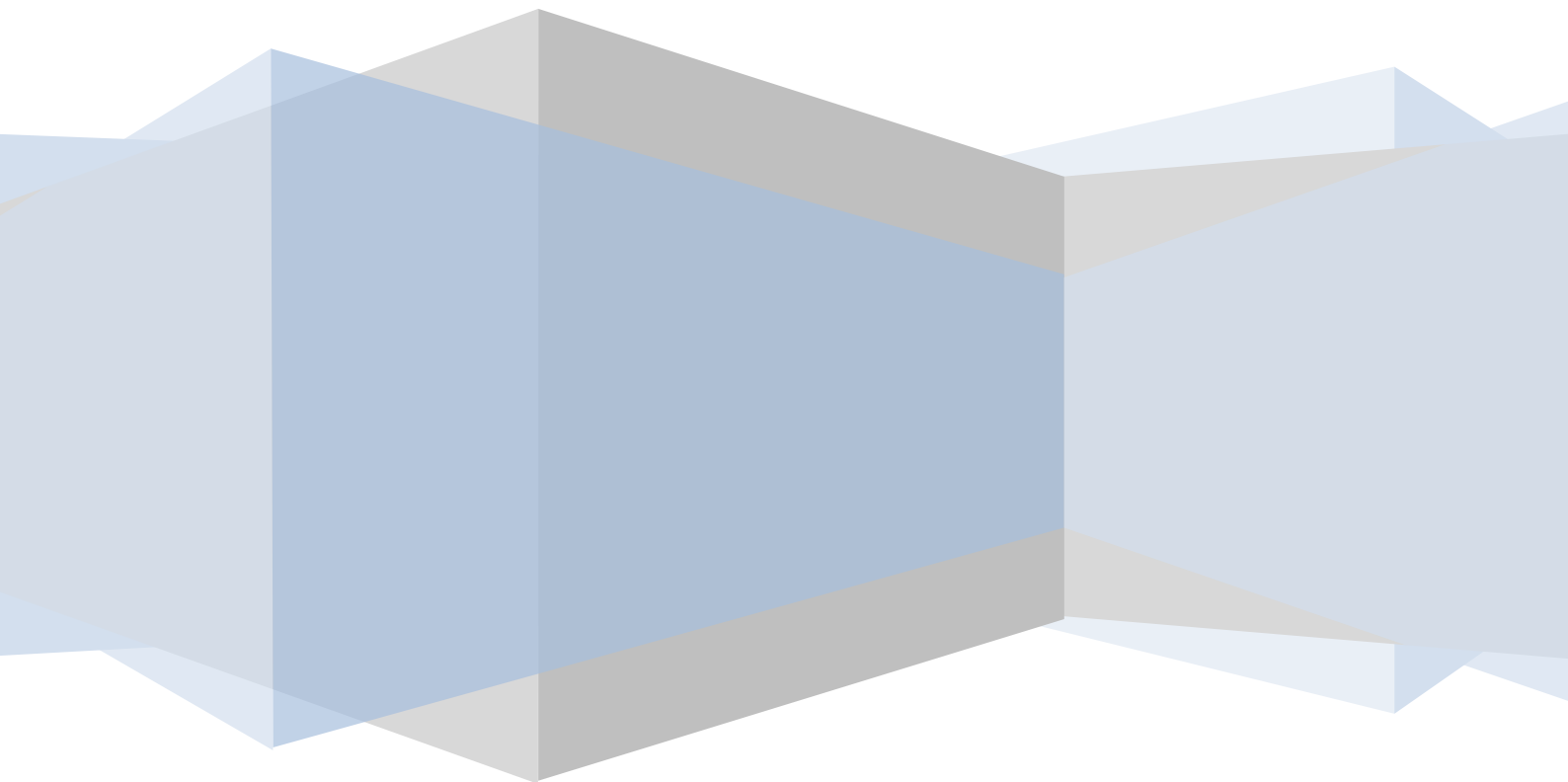
- a. **Meningkatnya kapasitas fiskal daerah untuk pembiayaan pembangunan**, dengan indikator kinerja utama:
- Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah;
  - Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - Prosentase pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang baik.

Selanjutnya, indikator dan target dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2  
Target Kinerja Tujuan/Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke				
			I	II	III	IV	V
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah	% PAD terhadap Pendapatan Daerah	17.63%	18.97%	19.63%	20.30%	20.97%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Prosentase pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang baik	-	-	-	95 %	100 %

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH**  
**KEBIJAKAN BADAN PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN PENDAPATAN**  
**DAERAH KABUPATEN BULELENG**



**BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN BULELENG**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan visi misi Daerah Kabupaten Buleleng. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan Badan Keuangan Daerah dihasilkan dari hasil potensi yang dimiliki untuk meningkatkan PAD.

**5.1. Strategi**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017- 2022 dalam pencapaian Misi I yang telah ditetapkan maka strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut

- a. Mengoptimalkan pendataan potensi pajak daerah, pelayanan dan informasi kepada wajib pajak serta penagihan;
- b. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah dengan memedomani regulasi/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dengan memedomani regulasi/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**5.2. Arah Kebijakan**

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan pula, dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng merumuskan beberapa kebijakan antara lain:

- a. Meningkatkan pendataan obyek pajak serta potensi Pajak Daerah.;
- b. Meningkatkan pelayanan dan Sistem Informasi kepada Wajib Pajak;
- c. Mengoptimalkan strategi penagihan Pajak Daerah;
- d. Menyusun regulasi atau kebijakan sesuai kebutuhan berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat mengelola keuangan daerah dengan baik dan tepat waktu;
- e. Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah;

- f. Menyusun regulasi atau kebijakan sesuai kebutuhan berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat mengelola barang milik daerah dengan baik; serta
- g. Optimalisasi strategi pengelolaan barang milik daerah.

Tabel 5.1 berikut menampilkan matrik keterkaitan tujuan dan sasaran yang tertuang di RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang di Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

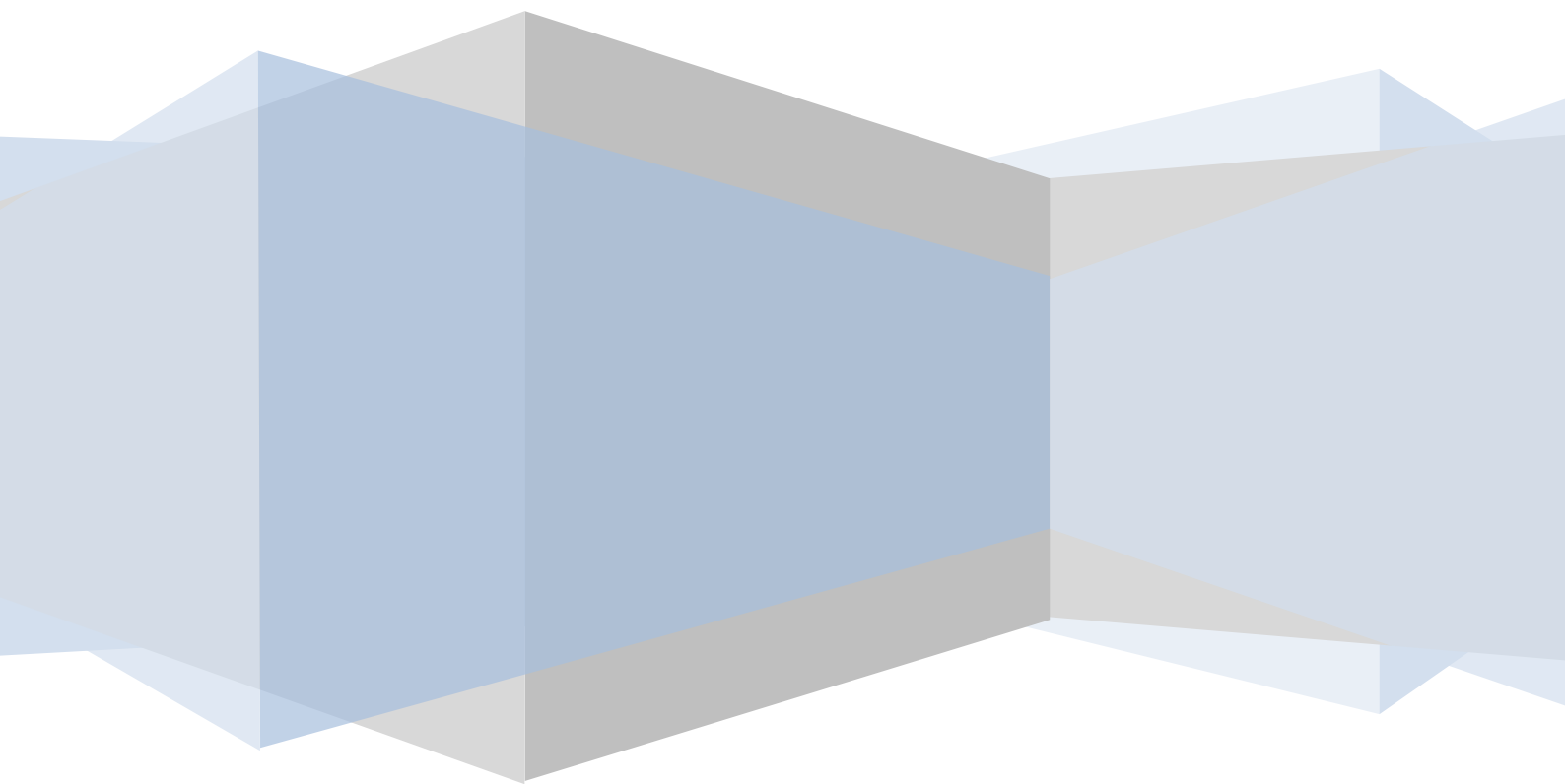
Tabel 5.1.

Matriks Keterkaitan Tujuan dan Sasaran yang tertuang di RPJMD dengan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah untuk pembiayaan pembangunan	Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi PAD	Terwujudnya PAD sesuai target	Meningkatnya PAD	Mengoptimalkan pendataan potensi pajak daerah, pelayanan dan informasi kepada wajib pajak serta penagihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan pendataan obyek pajak serta potensi Pajak Daerah.</li> <li>➤ Meningkatkan pelayanan dan Sistem Informasi kepada Wajib Pajak.</li> <li>➤ Mengoptimalkan strategi penagihan Pajak Daerah.</li> </ul>
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah dengan memedomani regulasi/peraturan perundang-undangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menyusun regulasi atau kebijakan sesuai kebutuhan berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat mengelola keuangan daerah dengan baik dan tepat waktu.</li> <li>➤ Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah.</li> </ul>
			Prosentase pengelolaan barang milik daerah yang baik	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola Barang Milik Daerah	Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dengan memedomani regulasi / peraturan perundang - undangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menyusun regulasi atau kebijakan sesuai kebutuhan berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat mengelola barang milik daerah dengan baik.</li> <li>➤ Optimalisasi strategi pengelolaan barang milik daerah.</li> </ul>

# **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam tahapan pelaksanaan pembangunan daerah merupakan serangkaian upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan kualitas kehidupan masyarakatnya melalui perbaikan perekonomian di berbagai sektor. Dalam memperbaiki perekonomian masyarakat harus disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang ada di suatu wilayah sehingga konsistensi dan kontinuitas pembangunan tetap terjaga. Oleh karena itu, dalam realisasi pelaksanaan pembangunan sektoral perlu adanya langkah-langkah taktis dan nyata berupa rencana strategis pembangunan sektoral yang secara teknis memiliki spesifikasi khusus dalam menjalankannya. Berdasarkan tujuan, sasaran, serta strategi dan kebijakan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng maka disusun langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun ke depan (2017-2022) yang meliputi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra PD. Program pembangunan merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi dimana semua muara program akan mencapai tujuan pembangunan daerah.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada “garis finish” yang sama yakni pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai lembaga pelayanan bidang keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun (2017-2022) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif terlampir pada tabel 6.1 .



**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng**  
**Tahun 2017-2022**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	6.333.441.744,00	100%	4.351.612.584,00	100%	4.598.341.878,38	100%	4.938.722.375,00	100%	5.310.801.726,36	100%	5.712.715.341,58
		001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Tersedianya jasa surat menyurat	24.650.000,00	20 Surat	25.850.000,00	20 Surat	28.435.000,00	20 Surat	30.000.000,00	20 Surat	30.000.000,00	20 Surat	40.000.000,00
		002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Tersedianya biaya rekening listrik, air dan telpon	404.250.000,00	25 Rekening	455.000.000,00	25 Rekening	500.500.000,00	25 Rekening	501.000.000,00	25 Rekening	586.801.726,36	25 Rekening	600.000.000,00
		003.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Output : Terlaksananya penyediaan untuk operasional kendaraan dinas/kantor	272.280.000,00	2 Unit	297.980.000,00	2 Unit	327.778.000,00	2 Unit	330.000.000,00	2 Unit	350.000.000,00	2 Unit	400.000.000,00
		006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Tersedianya biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	36.750.000,00	-18 Unit Roda Empat (MOBIL) -129 Unit Roda Dua (Sepeda Motor)	56.000.000,00	-18 Unit Roda Empat (MOBIL) -129 Unit Roda Dua (Sepeda Motor)	61.600.000,00	-18 Unit Roda Empat (MOBIL) -129 Unit Roda Dua (Sepeda Motor)	163.722.375,00	-18 Unit Roda Empat (MOBIL) -129 Unit Roda Dua (Sepeda Motor)	200.000.000,00	-18 Unit Roda Empat (MOBIL) -129 Unit Roda Dua (Sepeda Motor)	250.000.000,00
		007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Tersedianya jasa administrasi keuangan	1.316.120.000,00	4.000 SPP/SPM	1.229.488.000,00	4.000 SPP/SPM	1.352.436.800,00	4.000 SPP/SPM	1.400.000.000,00	4.000 SPP/SPM	1.400.000.000,00	4.000 SPP/SPM	1.500.000.000,00
		008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor	221.634.000,00	34 Jenis	256.871.000,00	34 Jenis	282.558.100,00	34 Jenis	300.000.000,00	34 Jenis	350.000.000,00	34 Jenis	350.000.000,00
		010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Tersedianya alat tulis kantor	165.685.307,00	2.024 Item	66.944.400,00	2.024 Item	73.638.840,00	2.024 Item	100.000.000,00	2.024 Item	150.000.000,00	2.024 Item	200.000.000,00
		011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Tersedianya barang cetak dan penggandaan dokumen-dokumen	49.484.000,00	1.079 buah	53.760.000,00	1.079 buah	59.136.000,00	1.079 buah	60.000.000,00	1.079 buah	100.000.000,00	1.079 buah	100.000.000,00
		012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	196.500.000,00	20 jenis	145.000.000,00	20 jenis	159.500.000,00	20 jenis	160.000.000,00	20 jenis	200.000.000,00	20 jenis	250.000.000,00

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

			013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output	:	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2.609.900.000,00	85 unit	682.765.000,00	85 unit	751.041.500,00	85 unit	800.000.000,00	85 unit	800.000.000,00	85 unit	878.715.341,58
			015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output	:	Jumlah data laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.900.000,00	96 eksemplar	12.000.000,00	96 eksemplar	13.200.000,00	96 eksemplar	14.000.000,00	96 eksemplar	14.000.000,00	96 eksemplar	14.000.000,00
			017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output	:	Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu	298.430.000,00	1700 Kotak	283.500.000,00	1700 Kotak	311.850.000,00	1700 Kotak	320.000.000,00	1700 Kotak	320.000.000,00	1700 Kotak	320.000.000,00
			018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Output	:	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah	298.506.437,00	20 orang	369.574.184,00	20 orang	218.099.638,38	20 orang	300.000.000,00	20 orang	350.000.000,00	20 orang	350.000.000,00
			022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Output	:	Terselenggaranya Jasa Administrasi Kepegawaian	427.352.000,00	141 orang	416.880.000,00	141 orang	458.568.000,00	141 orang	460.000.000,00	141 orang	460.000.000,00	141 orang	460.000.000,00
	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur .	02.		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Outcome</b>	:	<b>Mempertahankan fungsi sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>2.324.512.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.171.398.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.294.512.750,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.464.358.200,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.650.021.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.850.570.700,00</b>
			003.	Pembangunan Gedung Kantor	Output	:	Tersedianya bangunan gedung kantor	200.000.000,00	1 Unit	130.000.000,00	1 Unit	143.000.000,00	1 Unit	160.000.000,00	1 Unit	160.000.000,00	1 Unit	250.000.000,00
			005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Output	:	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	741.340.000,00	2 unit	555.000.000,00	2 unit	516.474.510,00	2 unit	475.000.000,00	2 unit	475.000.000,00	2 unit	475.000.000,00
			010.	Pengadaan Mebeleur	Output	:	Tersedianya mebeleur	73.800.000,00	14 buah	94.276.000,00	14 buah	103.703.600,00	14 buah	115.000.000,00	14 buah	115.000.000,00	14 buah	225.549.700,00
			012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Output	:	Tersedia dan terlaksananya sarana/parasarana upacara	134.600.000,00	51 Kali	173.500.000,00	51 Kali	190.850.000,00	51 Kali	210.000.000,00	51 Kali	210.000.000,00	51 Kali	210.000.000,00
			019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Output	:	Tersenggaranya upacara/hari-hari besar nasional	51.300.000,00	97 Buah	117.800.000,00	97 Buah	129.580.000,00	97 Buah	150.000.000,00	97 Buah	150.000.000,00	97 Buah	150.000.000,00

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

			022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Output	:	Terpeliharanya gedung kantor	533.012.000,00	3 unit	372.528.000,00	3 unit	409.780.800,00	3 unit	473.121.976,00	3 unit	550.000.000,00	3 unit	550.000.000,00
			024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Output	:	Terpeliharaan kendaraan dinas/operasional	326.500.000,00	135 unit	374.112.400,00	135 unit	411.523.640,00	135 unit	452.676.004,00	135 unit	500.000.000,00	135 unit	500.000.000,00
			026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Output	:	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	81.000.000,00	40 unit	141.950.000,00	40 unit	156.145.000,00	40 unit	171.759.500,00	40 unit	190.000.000,00	40 unit	190.000.000,00
			030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor/RT	Output	:	Terpeliharanya Alat - Alat Kantor/RT	61.500.000,00	15 Unit	76.500.000,00	15 Unit	84.150.000,00	15 Unit	92.565.000,00	15 Unit	115.021.000,00	15 Unit	115.021.000,00
			045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Output	:	Terlaksananya pendataan dan inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	121.460.000,00	1 Dokumen	135.732.000,00	1 Dokumen	149.305.200,00	1 Dokumen	164.235.720,00	1 Dokumen	185.000.000,00	1 Dokumen	185.000.000,00
	Meningkatnya aparatur yang mempunyai kedisiplinan yang optimal.	03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Outcome	:	Meningkatnya disiplin aparatur	234.760.000,00	100%	397.000.000,00	100%	419.509.100,00	100%	450.562.200,00	100%	484.507.200,00	100%	521.174.000,00
			002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Output	:	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	3.000.000,00	150 Stel	97.500.000,00	150 Stel	90.059.100,00	150 Stel	91.000.000,00	150 Stel	91.000.000,00	150 Stel	91.000.000,00
			005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Output	:	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	155.260.000,00	562 stel	199.500.000,00	562 stel	219.450.000,00	562 stel	220.000.000,00	562 stel	220.000.000,00	562 stel	220.000.000,00
			006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Output	:	Terlaksananya pembinaan rohani dan budaya aparatur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tirta yatra	76.500.000,00	2 Unit	100.000.000,00	2 Unit	110.000.000,00	2 Unit	139.562.200,00	2 Unit	173.507.200,00	2 Unit	210.174.000,00
	Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan, data serta bahan evaluasi.	06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Outcome	:	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	62.000.000,00	100%	62.000.000,00	100%	65.515.200,00	100%	70.364.800,00	100%	75.666.100,00	100%	81.392.400,00

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

			001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output	:	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	19.500.000,00	20 Buku / Dokumen	19.500.000,00	20 Buku / Dokumen	21.450.000,00	20 Buku / Dokumen	21.450.000,00	20 Buku / Dokumen	31.600.900,00	20 Buku / Dokumen	37.327.200,00
			002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Output	:	Tersedianya dokumen tentang laporan keuangan semesteran	-	-	-	-	4 Buku	-	4 Buku	-	4 Buku	-	-
			003.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Output	:	Tersedianya dokumen tentang prognosis realisasi anggaran	17.000.000,00	4 Buku	17.000.000,00	4 Buku	18.700.000,00	4 Buku	18.700.000,00	4 Buku	18.700.000,00	4 Buku	18.700.000,00
			004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Output	:	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	25.500.000,00	4 Buku	25.500.000,00	4 Buku	25.365.200,00	4 Buku	30.214.800,00	4 Buku	25.365.200,00	4 Buku	25.365.200,00
	Meningkatnya mutu perencanaan .	07.		Program Perencanaan Anggaran SKPD	Outcome	:	Tersedianya dokumen perencanaan anggaran SKPD	266.721.000,00	100%	196.601.000,00	100%	207.747.900,00	100%	223.125.900,00	100%	239.936.000,00	100%	258.094.000,00
			001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Output	:	Tersedianya Dokumen Anggaran SKPD	266.721.000,00	163 buku/dokumen	196.601.000,00	163 buku/dokumen	207.747.900,00	163 buku/dokumen	223.125.900,00	163 buku/dokumen	239.936.000,00	163 buku/dokumen	258.094.000,00
	Meningkatnya sarana dan prasarana pengembangan aplikasi dan jaringan	09.		Program Peningkatan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan	Outcome	:	Meningkatkan penyelenggaraan dan pengembangan aplikasi serta jaringan sistem informasi pengelolaan keuangan dan daerah	2.725.440.630,00	100%	3.187.193.820,00	100%	3.367.901.900,00	100%	3.617.202.400,00	100%	3.889.719.500,00	100%	4.184.087.800,00
			001.	Penyelenggaraan dan Pengembangan Aplikasi serta Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Output	:	Terselenggaranya aplikasi dan jaringan sistem informasi pengelolaan keuangan	2.725.440.630,00	42 SKPD	3.187.193.820,00	42 SKPD	3.367.901.900,00	42 SKPD	3.617.202.400,00	42 SKPD	3.889.719.500,00	42 SKPD	4.184.087.800,00

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	15.		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Outcome	:	Tersusnya dokumen pengelolaan keuangan daerah	8.545.789.550,00	2 dokumen	9.905.193.350,00	2 dokumen	1.256.799.800,00	2 dokumen	1.400.000.000,00	2 dokumen	1.650.000.000,00	2 dokumen	1.700.000.000,00
			002.	Penyusunan Standar Satuan Harga	Output	:	Jumlah buku standar satuan harga	265.665.800,00	100 Buku	255.665.800,00	100 Buku	496.799.800,00	100 Buku	500.000.000,00	100 Buku	550.000.000,00	100 Buku	550.000.000,00
			005.	Penyusunan Kebijakan Pendapatan	Output	:	Jumlah dokumen kebijakan pedoman pelaksanaan APBD	937.970.000,00	60 buku	601.310.000,00	60 buku	400.000.000,00	60 buku	450.000.000,00	60 buku	500.000.000,00	60 buku	500.000.000,00
			025.	Monitoring dan Evaluasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Output	:	Jumlah angka target PAD	211.250.000,00	1 Laporan	211.250.000,00	1 Laporan	210.000.000,00	1 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	300.000.000,00	1 Laporan	300.000.000,00
			031.	Penyuluhan dan Sosialisasi Pendapatan Daerah	Output	:	Jumlah dokumen penyuluhan dan sosialisasi pendapatan daerah	247.500.000,00	1 Dokumen	255.348.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00
			032.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penagihan Pajak Daerah	Output	:	Jumlah angka target pajak daerah	2.450.076.400,00	-100 % -231.669 WP	2.570.806.400,00	-100 % -231.669 WP							
			033.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penetapan Pajak Daerah	Output	:	Jumlah penetapan pajak daerah	645.129.250,00	350 WP	608.929.250,00	350 WP							
			034.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Daerah	Output	:	Jumlah pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak daerah	1.303.337.900,00	400 OP	2.690.768.700,00	400 OP							
			038.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah Dengan Sistem Online	Output	:	Jumlah angka target pajak daerah dengan sistem on line	425.250.000,00	100%	374.000.000,00	100%							
			043.	Verifikasi data dan keberatan pajak daerah	Output	:	Jumlah verifikasi data dan keberatan pajak daerah	344.406.200,00	100%	433.611.200,00	100%							

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

			044.	Pelayanan administrasi dan informasi pajak daerah	Output	:	Jenis informasi pajak daerah	1.172.202.200,00	100%	1.171.352.200,00	100%							
			045.	Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan bukan pajak daerah	Output	:	Jumlah angka target bukan pajak	543.001.800,00	1 laporan	732.151.800,00	1 laporan							
	Meningkatnya Dokumen Perda dan Perbup APBD	17.		Program Peningkatan Pelayanan Anggaran Daerah	Outcome	:	Jumlah dokumen APBD	5.219.275.700,00	150 dokumen	4.977.586.740,00	150 dokumen	5.259.806.800,00	150 dokumen	5.649.150.800,00	150 dokumen	6.074.753.300,00	150 dokumen	6.534.481.800,00
			002.	Penyusunan Kebijakan Pedoman Pelaksanaan APBD	Output	:	Jumlah dokumen kebijakan pedoman pelaksanaan APBD	591.094.000,00	42 SKPD	927.195.440,00	42 SKPD	1.009.806.800,00	42 SKPD	1.009.806.800,00	42 SKPD	1.100.000.000,00	42 SKPD	1.200.000.000,00
			003.	Pembinaan, dan Penyajian Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Output	:	Jumlah dokumen pembinaan dan penyajian informasi pengelolaan keuangan daerah	469.214.400,00	700 Buku/3 Dokumen	310.294.000,00	700 Buku/3 Dokumen	350.000.000,00	700 Buku/3 Dokumen	350.000.000,00	700 Buku/3 Dokumen	400.000.000,00	700 Buku/3 Dokumen	450.000.000,00
			004.	Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD	Output	:	Jumlah buku Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD	3.220.210.000,00	800 buku	2.864.264.200,00	800 buku	2.900.000.000,00	800 buku	3.239.344.000,00	800 buku	3.500.000.000,00	800 buku	3.684.481.800,00
			005.	Penyusunan Pergeseran APBD	Output	:	Jumlah Pergeseran APBD	623.399.400,00	150 buku	627.819.100,00	150 buku	650.000.000,00	150 buku	650.000.000,00	150 buku	674.753.300,00	150 buku	700.000.000,00
			006.	Pengesahan DPA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD	Output	:	Jumlah dokumen Pengesahan DPA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD	315.357.900,00	150 dokumen	248.014.000,00	150 dokumen	350.000.000,00	150 dokumen	400.000.000,00	150 dokumen	400.000.000,00	150 dokumen	500.000.000,00
	Meningkatnya Pelayanan Perbendaharaan Keuangan Daerah	18.		Program Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Keuangan Daerah	Outcome	:	Jumlah dokumen perbendaharaan	4.296.670.292,00	13000 SP2D	3.968.616.632,00	13000 SP2D	4.193.629.900,00	13000 SP2D	4.504.052.900,00	13000 SP2D	4.843.384.600,00	13000 SP2D	5.209.924.900,00
			001.	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan - Kebijakan Perbendaharaan	Output	:	Jumlah dokumen Pelaksanaan Kebijakan - Kebijakan Perbendaharaan	250.455.400,00	1 Dokumen/sur at edaran	279.004.800,00	1 Dokumen/sur at edaran	320.000.000,00	1 Dokumen/sur at edaran	350.000.000,00	1 Dokumen/sur at edaran	403.384.600,00	1 Dokumen/sur at edaran	420.000.000,00

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

			002.	Pembinaan penyusunan pengeluaran kas dan penetapan SPD	Output	:	Jumlah dokumen pengeluaran kas dan penetapan SPD	785.451.792,00	930 Dokumen	608.434.000,00	930 Dokumen	650.000.000,00	930 Dokumen	670.000.000,00	930 Dokumen	700.000.000,00	930 Dokumen	750.000.000,00
			003.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan Gaji PNSD	Output	:	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan Gaji PNSD	993.290.900,00	1.400 dokumen	788.504.900,00	1.400 dokumen	850.000.000,00	1.400 dokumen	870.000.000,00	1.400 dokumen	900.000.000,00	1.400 dokumen	950.000.000,00
			004.	Pelaksanaan pengendalian APBD dan penatausahaan dana transfer	Output	:	Jumlah dokumen Pelaksanaan pengendalian APBD dan penatausahaan dana transfer	273.131.000,00	500 Dokumen	343.433.352,00	500 Dokumen	363.629.900,00	500 Dokumen	400.000.000,00	500 Dokumen	450.000.000,00	500 Dokumen	500.000.000,00
			005.	Pelaksanaan penatausahaan dan penerbitan SP2D Belanja Langsung	Output	:	Jumlah SP2D	1.100.296.000,00	8000 SP2D	841.819.000,00	8000 SP2D	850.000.000,00	8000 SP2D	864.052.900,00	8000 SP2D	900.000.000,00	8000 SP2D	1.009.924.900,00
			006.	Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BUD, penyimpanan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah	Output	:	Jumlah laporan Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BUD, penyimpanan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah	300.465.000,00	360 Laporan	219.212.200,00	360 Laporan	250.000.000,00	360 Laporan	300.000.000,00	360 Laporan	350.000.000,00	360 Laporan	350.000.000,00
			007.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung	Output	:	Jumlah SP2D	299.407.700,00	5000 SP2D	495.762.600,00	5000 SP2D	500.000.000,00	5000 SP2D	550.000.000,00	5000 SP2D	600.000.000,00	5000 SP2D	630.000.000,00
			008.	Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Tidak Langsung	Output	:	Jumlah SKPD	154.735.600,00	42 SKPD dan 129 desa	154.925.700,00	42 SKPD dan 129 desa	160.000.000,00	42 SKPD dan 129 desa	200.000.000,00	42 SKPD dan 129 desa	220.000.000,00	42 SKPD dan 129 desa	250.000.000,00
			010.	Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Langsung	Output	:	Jumlah SKPD	139.436.900,00	42 SKPD	237.520.080,00	42 SKPD	250.000.000,00	42 SKPD	300.000.000,00	42 SKPD	320.000.000,00	42 SKPD	350.000.000,00
Meningkatnya Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	19.			Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Outcome	:	Jumlah dokumen LKPD yang terbit	3.251.814.000,00	42 SKPD	3.103.414.000,00	42 SKPD	3.279.371.900,00	42 SKPD	3.522.119.200,00	42 SKPD	3.787.472.800,00	42 SKPD	4.074.103.200,00

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

			001.	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Output	:	Jumlah dokumen Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah	128.750.000,00	1 Dokumen	85.144.400,00	1 Dokumen	114.371.900,00	1 Dokumen	130.000.000,00	1 Dokumen	157.472.800,00	1 Dokumen	184.103.200,00
			002.	Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Output	:	Jumlah SKPD	736.070.000,00	42 SKPD	766.051.500,00	42 SKPD	800.000.000,00	42 SKPD	850.000.000,00	42 SKPD	900.000.000,00	42 SKPD	940.000.000,00
			003.	Pemantauan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau Lembaga Keuangan Lainnya Yang Ditunjuk	Output	:	Jumlah dokumen Pemantauan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau Lembaga Keuangan Lainnya Yang Ditunjuk	40.429.000,00	1 Dokumen	60.429.000,00	1 Dokumen	65.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	80.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00
			004.	Pelaksanaan Pengelolaan Hutang dan Piutang Daerah dan Pengelolaan/Menatausahakan Investasi Daerah	Output	:	Jumlah SKPD	324.150.000,00	42 SKPD	303.774.100,00	42 SKPD	310.000.000,00	42 SKPD	340.000.000,00	42 SKPD	400.000.000,00	42 SKPD	440.000.000,00
			005.	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Output	:	Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	999.300.000,00	6 Dokumen	955.300.000,00	6 Dokumen	970.000.000,00	6 Dokumen	1.040.000.000,00	6 Dokumen	1.100.000.000,00	6 Dokumen	1.135.000.000,00
			006.	Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah	Output	:	Jumlah SKPD	43.841.410,00	42 SKPD	216.737.000,00	42 SKPD	250.000.000,00	42 SKPD	277.119.200,00	42 SKPD	300.000.000,00	42 SKPD	335.000.000,00
			007.	Pelaporan dan Pengembangan Aplikasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Output	:	Jumlah SKPD	411.570.000,00	42 SKPD	365.401.700,00	42 SKPD	400.000.000,00	42 SKPD	420.000.000,00	42 SKPD	450.000.000,00	42 SKPD	485.000.000,00
			008.	Pemantauan dan Tindak Lanjut Kerugian Daerah	Output	:	Jumlah SKPD	567.703.590,00	42 SKPD	350.576.300,00	42 SKPD	370.000.000,00	42 SKPD	390.000.000,00	42 SKPD	400.000.000,00	42 SKPD	435.000.000,00



## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

	Meningkatnya Pelayanan dan Analisa Kebutuhan Aset	20.		Program Peningkatan Pelayanan dan Analisis Kebutuhan Aset	Outcome	:	Jumlah dokumen laporan RKBMD ( rencana kebutuhan barang milik daerah )	1.285.256.850,00		1.225.447.760,00		1.294.928.400,00		1.390.782.200,00		1.495.562.600,00		1.608.744.600,00
			002.	Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Aset / Barang Milik Daerah	Output	:	Jumlah buku Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Aset / Barang Milik Daerah	206.486.250,00	120 buku	205.733.160,00	120 buku	225.000.000,00	120 buku	250.000.000,00	120 buku	300.000.000,00	120 buku	350.000.000,00
			005.	Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Untuk Pengamanan Barang	Output	:	Jumlah sertifikat	680.130.600,00	200 Sertifikat	621.074.600,00	200 Sertifikat	640.000.000,00	200 Sertifikat	680.000.000,00	200 Sertifikat	700.000.000,00	200 Sertifikat	750.000.000,00
			006.	Pelaksanaan Penilaian barang milik daerah	Output	:	Jumlah OP ( Obyek penilaian )	398.640.000,00	200 OP	398.640.000,00	200 OP	429.928.400,00	200 OP	460.782.200,00	200 OP	495.562.600,00	200 OP	508.744.600,00
	Meningkatnya Pelayanan Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset	21.		Program Peningkatan Pelayanan Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset	Outcome	:	Jumlah dokumen laporan kartu inventarisasi barang daerah ( KIB )	1.541.535.150,00	42 SKPD	2.546.492.630,00	42 SKPD	2.690.874.100,00	42 SKPD	2.890.059.300,00	42 SKPD	3.107.794.000,00	42 SKPD	3.342.987.400,00
			001.	Penyusunan Laporan Milik Daerah	Output	:	Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Milik Daerah	180.550.000,00	95 buku/dokumen	315.483.200,00	95 buku/dokumen	360.874.100,00	95 buku/dokumen	400.000.000,00	95 buku/dokumen	450.000.000,00	95 buku/dokumen	500.000.000,00
			002.	Pelaksanaan Penatausahaan / Inventarisasi Barang / Aset Daerah	Output	:	Jumlah SKPD	285.695.000,00	42 SKPD	1.230.005.760,00	42 SKPD	1.250.000.000,00	42 SKPD	1.290.000.000,00	42 SKPD	1.320.000.000,00	42 SKPD	1.370.000.000,00
			003.	Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Output	:	Jumlah dokumen Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	355.965.400,00	20 Dokumen	339.768.400,00	20 Dokumen	360.000.000,00	20 Dokumen	400.000.000,00	20 Dokumen	440.000.000,00	20 Dokumen	490.000.000,00
			004.	Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah	Output	:	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah	436.928.350,00	39 Dokumen	400.474.160,00	39 Dokumen	420.000.000,00	39 Dokumen	460.000.000,00	39 Dokumen	500.000.000,00	39 Dokumen	540.000.000,00
			005.	Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Output	:	Jumlah SKPD	282.396.400,00	42 SKPD	260.761.110,00	42 SKPD	300.000.000,00	42 SKPD	340.059.300,00	42 SKPD	397.794.000,00	42 SKPD	442.987.400,00
	Meningkatnya pelayanan penerimaan dan penagihan PAD	22.		Program Peningkatan dan Pelayanan PAD	Outcome	:	Jumlah pelayanan, penerimaan dan penagihan PAD				100%	5.130.000.000,00	100%	5.270.000.000,00	100%	5.638.509.900,00	100%	6.503.350.600,00

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

			001.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penagihan Pajak Daerah	Output	:	Jumlah angka target pajak daerah			-100 % -231.669 WP	950.000.000,00	-100 % -231.669 WP	950.000.000,00	-100 % -231.669 WP	950.500.000,00	-100 % -231.669 WP	1.153.350.600,00															
			002.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah Dengan Sistem Online	Output	:	Jumlah angka target pajak daerah dengan sistem on line			100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	650.000.000,00															
			003.	Pelayanan administrasi dan informasi pajak daerah	Output	:	Jenis informasi pajak daerah			100%	1.200.000.000,00	100%	1.200.000.000,00	100%	1.300.000.000,00	100%	1.400.000.000,00															
			004.	Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan bukan pajak daerah	Output	:	Jumlah angka target bukan pajak			1 laporan	800.000.000,00	1 laporan	800.000.000,00	1 laporan	894.000.000,00	1 laporan	950.000.000,00															
			005.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah (UPTD Buleleng I)	Output	:	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah			69.955 Wajib Pajak	554.500.000,00	69.955 Wajib Pajak	600.000.000,00	69.955 Wajib Pajak	600.000.000,00	69.955 Wajib Pajak	800.000.000,00															
			006.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah (UPTD Buleleng II)	Output	:	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah			117.633 Wajib Pajak	825.000.000,00	117.633 Wajib Pajak	870.000.000,00	117.633 Wajib Pajak	894.009.300,00	117.633 Wajib Pajak	950.000.000,00															
			007.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah (UPTD Buleleng III)	Output	:	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah			69.955 Wajib Pajak	400.500.000,00	69.955 Wajib Pajak	450.000.000,00	69.955 Wajib Pajak	500.000.000,00	69.955 Wajib Pajak	600.000.000,00															
	Meningkatnya pendataan dan penetapan PAD	23.		Program Pendataan dan Pengembangan PAD	Outcome	:	Jumlah data dan penetapan PAD			400 OP	4.080.000.000,00	400 OP	4.571.578.400,00	400 OP	4.800.000.000,00	400 OP	4.800.000.000,00															
			001.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penetapan Pajak Daerah	Output	:	Jumlah penetapan pajak daerah			350 WP	600.000.000,00	350 WP	800.000.000,00	350 WP	800.000.000,00	350 WP	800.000.000,00															
			002.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Daerah	Output	:	Jumlah pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak daerah			400 OP	3.000.000.000,00	400 OP	3.291.578.400,00	400 OP	3.500.000.000,00	400 OP	3.500.000.000,00															
			003.	Verifikasi data dan keberatan pajak daerah	Output	:	Jumlah verifikasi data dan keberatan pajak daerah			100%	480.000.000,00	100%	480.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00															
<b>JUMLAH</b>											<b>36.087.216.916,00</b>						<b>36.092.556.916,00</b>			<b>38.138.939.628,38</b>					<b>40.962.078.675,00</b>				<b>44.048.128.726,36</b>			<b>47.381.626.741,58</b>

Tabel 6.2 Target Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018-2022

**INDIKATOR KINERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BULELENG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD  
Tahun 2018 - 2022**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Misi ke I : Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif</b>								
1.	% PAD terhadap APBD	16.31%	17.63%	18.97%	19.63%	20.30%	20.97%	20.97%
2.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan ini mulai berlaku 12 Maret 2019. PP ini mengatur mengenai lingkup keuangan daerah yang meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Selain itu, dalam PP ini mengatur mengenai pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan Rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, laporan realisasi, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, Badan Layanan Umum Daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, hingga pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, mulai diberlakukan tanggal 27 September 2019. Permendagri ini mengatur tentang informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat. Permendagri ini untuk memenuhi kewajiban Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2020. Kodefikasi dan Nomenklatur Program / Kegiatan dan Belanja Daerah dalam Permendagri ini merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan sinkronisasi tata kelola penyelenggaraan pemerintah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3798 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur) ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.

Tabel 6.3

Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	KeluaranSub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target			
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02	KEUANGAN															
5	02	01								37,753,751,480		41,529,126,783					
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							25,720,601,584		28,292,661,422					
5	02	01	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							207,477,422		228,224,764				
5	02	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan serta evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bulelen g, Bulelen g, Kendran	100 %	3 Dokumen	24 Dokumen	133,012,382	Pendapata n Pajak Daerah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	146,313,620
5	02	01	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan serta evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bulelen g, Bulelen g, Kendran	100 %	2 Dokumen	24 Dokumen	10,000,000	Pendapata n Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	11,000,000
5	02	01	2.0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan serta evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bulelen g, Bulelen g, Kendran	100 %	2 Dokumen	24 Dokumen	10,000,000	Pendapata n Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	11,000,000
5	02	01	2.0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan serta evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bulelen g, Bulelen g,	100 %	2 Dokumen	24 Dokumen	10,000,000	Pendapata n Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	11,000,000



**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	129 Dokumen	100 %	154,301,040	Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	169,731,144
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	20000 SPP/SPM	100 %	465,832,680	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	512,415,948
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun BPKPD	Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	2 Dokumen	100 %	10,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	11,000,000
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran BPKPD	Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	26 Dokumen	100 %	10,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	11,000,000
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran BPKPD	Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	2 Dokumen	100 %	98,400,000	Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	108,240,000
<b>5.02.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								<b>5,537,180</b>					<b>6,090,898</b>

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya dokumen penatausahaan BMD pada SKPD	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	5,537,180	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	6,090,898
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>356,973,800</b>			<b>392,671,000</b>	
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tingkat disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	415 Pasang	100 %	260,323,800	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	286,356,000
5	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	Tingkat disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	129 Dokumen	100 %	41,050,000	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	45,155,000
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang diikuti berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tingkat disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	10 Kali	100 %	55,600,000	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	61,160,000
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>1,769,274,775</b>			<b>1,946,202,790</b>	



**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur SKPD	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	38 Jenis	100 %	76,095,455	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	83,705,000
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur SKPD	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	106 Unit	100 %	217,626,400	Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	239,389,040
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah peralatan rumah tangga SKPD yang tersedia	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur SKPD	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	50 Unit	100 %	7,805,000	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	8,585,500
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur SKPD	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	94 Jenis	100 %	461,594,140	Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	507,754,000
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur SKPD	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	6 Jenis	100 %	26,014,780	Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	28,616,250

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur SKPD	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	120 Eksemplar	100 %	12,000,000	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	13,200,000
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman tamu SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur SKPD	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	1600 Kotak	100 %	50,000,000	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	55,000,000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah peserta yang mengikuti undangan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah/dalam daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur SKPD	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	140 Orang	100 %	233,349,000	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	256,684,000
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah arsip dinamis yang ditata pada SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur SKPD	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	15000 Dokumen	100 %	72,790,000	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	80,069,000
5	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah arsip dinamis yang ditata pada SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur SKPD	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	5 Aplikasi	100 %	612,000,000	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	673,200,000
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>96,410,000</b>				<b>106,051,000</b>	

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia	Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	1 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	0
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah pengadaan meubelair kantor	Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	36 Buah	100 %	96,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	106,051,000
<b>5 02 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>1,406,259,787</b>					<b>1,546,885,529</b>
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah surat yang dikelola dengan baik	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	1000 Surat	100 %	117,965,397	Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	129,761,900
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan tepat waktu	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	26 Rekening	100 %	533,000,500	Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	586,300,550
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	2 Unit	100 %	424,272,000	Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	466,699,000
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Buleleng,	100 %	1 Jenis	100 %	331,021,890	Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan	100 %	364,124,079

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

					publik					Bulelen g, Kendran							publik		
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>1,048,318,673</b>			<b>1,153,150,500</b>	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah perizinan kendaraan dinas / operasional yang dibayarkan dan laik jalan sertaterpelihara dengan baik	Terpeliharanya barang milikdaerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bulelen g, Bulelen g, Kendra n	100 %	164 Unit	100 %	496,104,960	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	545,715,500		
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah pemeliharaan meubelair kantor	Terpeliharanya barang milikdaerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bulelen g, Bulelen g, Kendra n	100 %	30 Buah	100 %	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	4,950,000		
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Terpeliharanya barang milikdaerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bulelen g, Bulelen g, Kendra n	100 %	5 Unit	100 %	20,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	22,209,000		

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah gedung/kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	4 Unit	100 %	435,393,713	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	478,933,000
5 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang terpelihara secara rutin/berkala dengan baik	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	90 Unit	100 %	92,130,000	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	101,343,000
5 02 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>								<b>6,024,322,884</b>					<b>6,626,755,520</b>
5 02 02 2.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>								<b>2,678,062,491</b>					<b>2,945,868,800</b>
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Meningkatnya investasi	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	150 Dokumen	2 Dokumen	100 %	176,181,000	Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatnya investasi	150 Dokumen	193,799,100
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Meningkatnya investasi	Jumlah Dokumen KUPA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	150 Dokumen	2 Dokumen	100 %	190,303,856	Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatnya investasi	150 Dokumen	209,334,250
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Meningkatnya investasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Hasil Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng	150 Dokumen	40 SKPD	100 %	31,321,180	Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatnya investasi	150 Dokumen	34,453,300

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Meningkatnya investasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Hasil Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	150 Dokumen	40 SKPD	100 %	31,321,180	Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatnya investasi	150 Dokumen	34,453,300
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Meningkatnya investasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Hasil Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, g.	150 Dokumen	40 SKPD	100 %	31,321,180	Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatnya investasi	150 Dokumen	34,453,300
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Meningkatnya investasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Hasil Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	150 Dokumen	40 SKPD	100 %	31,321,180	Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatnya investasi	150 Dokumen	34,453,300

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Meningkatnya investasi	Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang Diterbitkan	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendra	150 Dokumen	425 Buku	100 %	728,136,500	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Meningkatnya investasi	150 Dokumen	800,950,150	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Meningkatnya investasi	Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendra	150 Dokumen	525 Buku	100 %	766,755,890	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Meningkatnya investasi	150 Dokumen	843,431,500	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Meningkatnya investasi	Jumlah Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendra	150 Dokumen	3 Dokumen	100 %	499,510,910	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Meningkatnya investasi	150 Dokumen	549,462,000	

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Meningkatnya investasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah yang Dilaksanakan	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	150 Dokumen	2 Dokumen	100 %	72,094,870	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya investasi	150 Dokumen	79,304,400
5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Meningkatnya investasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Anggaran Pembiayaan Daerah yang Dilaksanakan	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	150 Dokumen	2 Dokumen	100 %	69,712,745	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	150 Dokumen	76,684,000
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Meningkatnya investasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	150 Dokumen	40 SKPD	100 %	50,082,000	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	150 Dokumen	55,090,200
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>							<b>1,808,805,073</b>				<b>1,989,685,790</b>	



**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah pelaporan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang perbendaharaan keuangan daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	150 Dokumen	360 Laporan	100 %	51,543,962	Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatnya investasi	150 Dokumen	56,698,400
5.02.02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen pengelolaan SILPA	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang perbendaharaan keuangan daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	150 Dokumen	1 Dokumen	100 %	14,267,265	Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatnya investasi	150 Dokumen	15,694,000
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Meningkatnya investasi	Jumlah anggaran kas SKPD dan SPD SKPD yang diterbitkan tepat waktu	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang perbendaharaan keuangan daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	150 Dokumen	930 Dokumen	100 %	92,270,467	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya investasi	150 Dokumen	101,497,500
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen penatausahaan pembiayaan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang perbendaharaan keuangan daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	150 Dokumen	100 SP2D	100 %	16,355,570	Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatnya investasi	150 Dokumen	17,991,150
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen tentang penerbitan posisi kas harian, Dana Transfer Provinsi dan Pusat	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang perbendaharaan keuangan daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	150 Dokumen	100 %	100 %	195,170,325	Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatnya investasi	150 Dokumen	214,687,400

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Meningkatnya investasi	Jumlah Laporan Transaksi Non Tunai untuk Pendapatan dan Belanja Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang perbendaharaan keuangan daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendra	150 Dokumen	1 Laporan	100 %	152,480,249	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	150 Dokumen	167,728,300
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Meningkatnya investasi	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang perbendaharaan keuangan daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendra	150 Dokumen	1400 Dokumen	100 %	382,095,915	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya investasi	150 Dokumen	420,305,500

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 02 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Meningkatnya investasi	Jumlah Laporan SKPD mengenai Pengelolaan Hutang dan Piutang Daerah dan Pengelolaan / Menatausahakan Investasi Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang perbendaharaan keuangan daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendra	150 Dokumen	40 SKPD	100 %	195,215,400	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya investasi	150 Dokumen	214,736,940
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang perbendaharaan keuangan daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendra	150 Dokumen	15000 SP2D	100 %	473,707,060	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Meningkatnya investasi	150 Dokumen	521,077,800
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen/surat edaran tentang teknis administrasi keuangan terkait penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang perbendaharaan keuangan daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendra	150 Dokumen	1 Dokumen	100 %	14,048,485	Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatnya investasi	150 Dokumen	15,453,400

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Meningkatnya investasi	Jumlah Laporan Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang perbendaharaan keuangan daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendra n	150 Dokumen	40 SKPD	100 %	221,650,375	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya investasi	150 Dokumen	243,815,400
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>							<b>1,231,767,560</b>				<b>1,354,944,380</b>	
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk	Meningkatnya pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendra n	150 Dokumen	50 Transaksi	100 %	153,372,000	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya investasi	150 Dokumen	168,709,200

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Meningkatnya investasi	Jumlah Laporan SKPD mengenai Rekonsiliasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan	Meningkatnya pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	150 Dokumen	480 Dokumen	100 %	195,272,000	Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatnya investasi	150 Dokumen	214,799,200
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen/buku Laporan Keuangan dan Ranperda tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Meningkatnya pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	150 Dokumen	17 Dokumen	100 %	262,442,200	Pendapatan Pajak Daerah Dana Insentif Daerah		Meningkatnya investasi	150 Dokumen	288,686,420
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah konsolidasi yang dilaksanakan terkait penyusunan Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	150 Dokumen	1 Dokumen	100 %	121,582,200	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya investasi	150 Dokumen	133,740,420
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	150 Dokumen	2 Dokumen	100 %	195,237,700	Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatnya investasi	150 Dokumen	214,761,470

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

						Kabupaten/Kota											
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen/buku laporan tanggapan/tindakan lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Meningkatnya pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	150 Dokumen	1 Dokumen	100 %	73,507,900	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	150 Dokumen	80,858,690
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen pertimbangan penyelesaian kerugian daerah	Meningkatnya pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	150 Dokumen	5 Dokumen	100 %	13,817,800	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	150 Dokumen	15,199,580
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah Surat Edaran mengenai kebijakan dan panduan teknis penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	150 Dokumen	1 Dokumen	100 %	111,936,960	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	150 Dokumen	123,130,700

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Meningkatnya investasi	Jumlah PPK-SKPD yang kapasitasnya ditingkatkan mengenai Akuntansi Keuangan Daerah	Meningkatnya pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendra	150 Dokumen	40 SKPD	100 %	104,598,800	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya investasi	150 Dokumen	115,058,700
5	02	02	2.05		<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>							<b>305,687,760</b>			<b>336,256,550</b>		
5	02	02	2.05	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Terkelolanya data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendra	150 Dokumen	1 Dokumen	100 %	2,750,000	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	150 Dokumen	3,025,000
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah laporan implementasi dan pemeliharaan SIPD Bidang Keuangan Daerah	Terkelolanya data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendra	150 Dokumen	1 Dokumen	100 %	302,937,760	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Meningkatnya investasi	150 Dokumen	333,231,550
5	02	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>							<b>1,668,564,520</b>			<b>1,835,421,100</b>		
5	02	03	2.01		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>							<b>1,668,564,520</b>			<b>1,835,421,100</b>		

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bulelen g, Bulelen g, Kendra n	2 Doku m en	2 Dokumen	100 %	84,657,970	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya investasi	2 Dokume n	93,123,800
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen Standarisasi Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bulelen g, Bulelen g, Kendra n	2 Doku m en	1 Dokumen	100 %	67,333,950	Pendapata n Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	2 Dokume n	74,067,400
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Pemeliharaan / Perawatan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bulelen g, Bulelen g, Kendra n	2 Doku m en	2 Dokumen	100 %	47,150,000	Pendapata n Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	2 Dokume n	51,865,000
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah Regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bulelen g, Bulelen g, Kendra n	2 Doku m en	1 Dokumen	100 %	14,602,750	Pendapata n Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	2 Dokume n	16,063,000



**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	2 Dokumen	40 Dokumen	100 %	153,620,808	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya investasi	2 Dokumen	168,982,900	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	2 Dokumen	40 Dokumen	100 %	283,867,167	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya investasi	2 Dokumen	312,253,900	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah Obyek Penilaian Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	2 Dokumen	50 Obyek Penilaian	100 %	367,070,313	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	2 Dokumen	403,777,400	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	2 Dokumen	30 Dokumen	100 %	204,592,560	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	2 Dokumen	225,051,850	

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	2 Dokumen	30 Dokumen	100 %	232,009,880	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya investasi	2 Dokumen	255,210,900
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen Rekonsiliasi terhadap Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	2 Dokumen	480 Dokumen	100 %	113,319,067	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	2 Dokumen	124,650,900
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB) yang disusun	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	2 Dokumen	12 Dokumen	100 %	84,364,780	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	2 Dokumen	92,801,250
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Meningkatnya investasi	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	2 Dokumen	40 SKPD	100 %	15,975,275	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	2 Dokumen	17,572,800
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>4,340,262,492</b>				<b>4,774,288,741</b>	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>							<b>4,340,262,492</b>				<b>4,774,288,741</b>	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah data angka target pendapatan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan PAD	Kab. Buleleng, Buleleng, Buleleng	100 %	2 Dokumen	100 %	249,306,560	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	100 %	274,237,216

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Meningkatnya investasi	Jumlah perumusan Standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi	Meningkatnya kualitas pelayanan PAD	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendra n	100 %	10 Dokumen	100 %	157,598,710	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya investasi	100 %	173,358,581
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah informasi pajak yang disebarluaskan	Meningkatnya kualitas pelayanan PAD	Kab. Buleleng, Buleleng, g.	100 %	11 Pajak	100 %	67,549,530	Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatnya investasi	100 %	74,304,483
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan PAD	Kab. Buleleng, Buleleng, g, Kendra n	100 %	10 Sarana Pajak Daerah	100 %	1,045,913,020	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya investasi	100 %	1,150,504,322
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang terdata / terdaftar	Meningkatnya kualitas pelayanan PAD	Kab. Buleleng, Buleleng, g.	100 %	1500 Wajib Pajak	100 %	76,064,070	Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatnya investasi	100 %	83,670,477

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah basis data pajak daerah dan retribusi daerah yang terpelihara	Meningkatnya kualitas pelayanan PAD	Kab. Bulelen g, Bulelen g, Kendran	100 %	264538 Wajib Pajak	100 %	354,715,040	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya investasi	100 %	390,186,544
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Meningkatnya investasi	Jumlah Laporan penilaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah dan Bangunan	Meningkatnya kualitas pelayanan PAD	Kab. Bulelen g, Bulelen g, Kendran	100 %	1 Laporan	100 %	95,204,300	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya investasi	100 %	104,724,730
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen penetapan Wajib Pajak	Meningkatnya kualitas pelayanan PAD	Kab. Bulelen g, Bulelen g, Kendran	100 %	500 Wajib Pajak	100 %	119,998,060	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya investasi	100 %	131,997,866

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah Wajib Pajak yang terlayani	Meningkatnya kualitas pelayanan PAD	Kab. Bulelen g, Bulelen g, Kendran	100 %	15000 Wajib Pajak	100 %	984,764,062	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya investasi	100 %	1,083,240,468	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah Berita Acara atas verifikasi pelaporan pajak daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan PAD	Kab. Bulelen g, Bulelen g, Kendran	100 %	400 Obyek Pajak	100 %	99,242,500	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya investasi	100 %	109,166,750	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah Wajib Pajak yang tertagih	Meningkatnya kualitas pelayanan PAD	Kab. Bulelen g, Bulelen g, Kendran	100 %	264538 Wajib Pajak	100 %	275,271,600	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya investasi	100 %	302,798,760	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah Surat Keputusan atas Keberatan Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan PAD	Kab. Bulelen g, Bulelen g, Kendran	100 %	500 Obyek Pajak	100 %	103,180,500	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	100 %	113,498,550	

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah laporan data pemeriksaan pajak daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan PAD	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	25 Obyek Pajak	100 %	197,628,000	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	100 %	217,390,800
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan PAD	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	100 %	1 Laporan	100 %	513,826,540	Pendapatan Pajak Daerah Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya investasi	100 %	565,209,194
<b>TOTAL</b>													<b>37,753,751,480</b>			<b>41,529,126,783</b>	

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang terdata / terdaftar	Meningkatnya kualitas pelayanan PAD UPTD Buleleng I	Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit	100 %	1500 Wajib Pajak	100 %	298,073,820	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Meningkatnya investasi	100 %	327,881,202	
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah Wajib Pajak yang terlayani	Meningkatnya kualitas pelayanan PAD UPTD Buleleng I	Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit	100 %	54750 Wajib Pajak	100 %	278,781,860	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya investasi	100 %	306,660,045	
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah Wajib Pajak yang tertagih	Meningkatnya kualitas pelayanan PAD UPTD Buleleng I	Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit	100 %	69955 Wajib Pajak	100 %	417,293,080	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya investasi	100 %	459,022,388	
<b>TOTAL</b>									<b>994,148,760</b>				<b>1,093,563,635</b>	
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang terdata / terdaftar	Meningkatnya kualitas pelayanan PAD UPTD Buleleng II	Kab. Buleleng, Sukasad	100 %	1500 Wajib Pajak	100 %	351,058,170	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	100 %	386,163,987	

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

								a, Sukasada										
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah Wajib Pajak yang terlayani	Meningkatnya kualitas pelayanan PAD UPTD Buleleng II	Kab. Buleleng, Sukasada, Sukasada	100 %	105700 Wajib Pajak	100 %	391,987,450	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya investasi	100 %	431,186,195
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah Wajib Pajak yang tertagih	Meningkatnya kualitas pelayanan PAD UPTD Buleleng II	Kab. Buleleng, Sukasada, Sukasada	100 %	117633 Wajib Pajak	100 %	581,702,222	Pendapatan Pajak Daerah Dana Insentif Daerah		Meningkatnya investasi	100 %	639,872,444
<b>TOTAL</b>													<b>1,324,747,842</b>					<b>1,457,222,626</b>

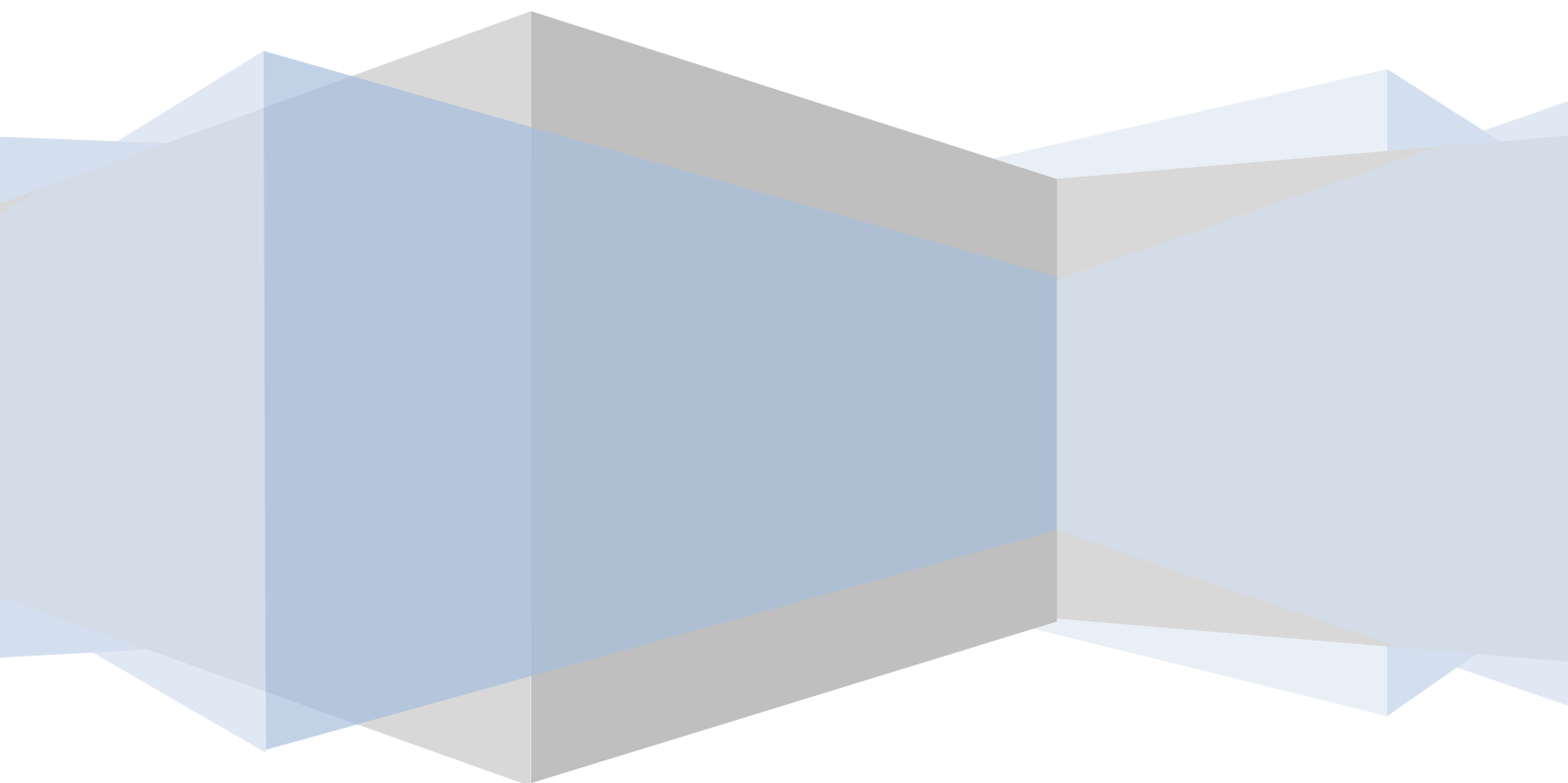


**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang terdata / terdaftar	Meningkatnya kualitas pelayanan PAD UPTD Buleleng III	Kab. Buleleng, Seririt, Seririt	100 %	720 Wajib Pajak	100 %	251,847,765	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya investasi	100 %	277,032,541	
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah Wajib Pajak yang terlayani	Meningkatnya kualitas pelayanan PAD UPTD Buleleng III	Kab. Buleleng, Seririt, Seririt	100 %	1200 Wajib Pajak	100 %	230,785,990	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya investasi	100 %	253,864,589	
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Meningkatnya investasi	Jumlah Wajib Pajak yang tertagih	Meningkatnya kualitas pelayanan PAD UPTD Buleleng III	Kab. Buleleng, Seririt, Seririt	100 %	66162 Wajib Pajak	100 %	460,442,365	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Meningkatnya investasi	100 %	506,486,601	
<b>TOTAL</b>									<b>943,076,120</b>				<b>1,037,383,731</b>	
<b>5 02 02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>								<b>248,087,199,745</b>				<b>272,895,919,720</b>	
<b>5 02 02 2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>								<b>248,087,199,745</b>				<b>272,895,919,720</b>	
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya data pelaksanaan kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	150 Dokumen	1 Tahun	100 %	248,087,199,745	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Desa	Meningkatnya investasi	150 Dokumen	272,895,919,720	
<b>TOTAL</b>									<b>248,087,199,745</b>				<b>272,895,919,720</b>	

# **BAB VII**

## **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017-2022**



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG**  
**TAHUN 2017-2022**

**7.1. Indikator Kinerja**

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki.

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja pemerintah, maka disusunlah indikator kerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

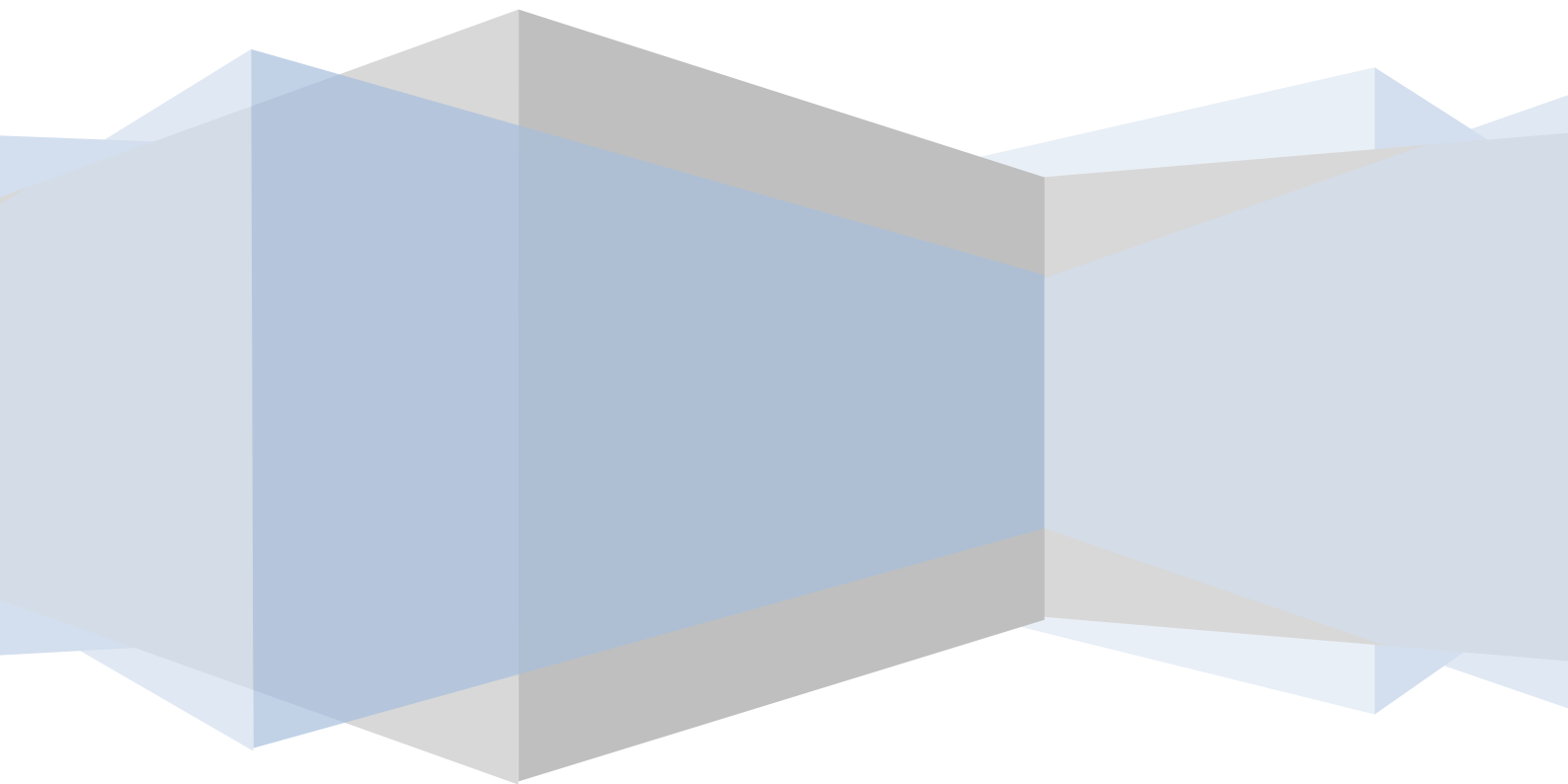
Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah sebagai perencana sekaligus koordinator penyelenggaraan pembangunan daerah. Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng harus memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng. Keselarasan ini ditunjukkan dengan implementasi indikator program dalam RPJMD dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang tersaji pada tabel 7.1 berikut ini.

**Tabel 7.1.**  
**Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Buleleng Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Persentase peningkatan kemandirian keuangan daerah	30,85%	31,64%	32,70%	33,22%	33,75	34,28%	34,28%
2.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

# **BAB VIII**

# **PENUTUP**



## **BAB VIII PENUTUP**

### **8.1. Kesimpulan**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng selama lima tahun ke depan. Sasaran utama dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku lembaga yang diberikan kewenangan bidang keuangan adalah memastikan bahwa pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) PD dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan maka Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2017-2022 tidak bersifat kaku dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk mengedepankan aspek perencanaan Perangkat Daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi.

### **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 yang disusun melalui berbagai tahapan seperti persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir renstra, dan diakhiri dengan penetapan renstra. Setelah RPJMD Tahun 2017-2022 ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD.

Setelah rancangan akhir Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng dilakukan verifikasi dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD, maka selanjutnya diajukan kepada Kepala Daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menetapkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai pedoman unit kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Atas dasar itulah, beberapa hal perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dilakukan melalui Rencana Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah setiap tahun dan realisasinya melalui DPA - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah setiap tahun;
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun Lakip sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi

efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam mencapai sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan

7. Pasca pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah akan mendapatkan rekomendasi tentang pelaksanaan Renstra melalui Renja. Dengan berdasarkan rekomendasi tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat menentukan untuk melanjutkan kebijakan atau harus melakukan perubahan kebijakan dan program pembangunan yang dituangkan pada Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah periode berikutnya.

Singaraja, 30 Desember 2020

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Pendapatan Daerah Kab. Buleleng



**Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si**

NIP. 196703021989011001